

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN NATO (*NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION*) DALAM PENANGANAN ANCAMAN NON-TRADISIONAL**

**(STUDI KASUS: *THE 2010 NEW STRATEGIC CONCEPT*)**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD NUR SETIA BUDI IRWAN**

**E131 13 014**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TRANSFORMASI KEBIJAKAN NATO (*NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION*) DALAM PENANGANAN  
ANCAMAN NON-TRADISIONAL (STUDI KASUS : *THE 2010 NEW STRATEGIC CONCEPT*)

NAMA : MUHAMMAD NUR SETIA BUDI IRWAN

NIM : E 131 13 014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 2 Maret 2017

Mengetahui :

Pembimbing I,



Agussalim, S.IP, MIRAP  
NIP. 19760818 200501 1 003

Pembimbing II,



Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si  
NIP. 19710109 200801 2 005

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D  
NIP. 19620102 199002 1 003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : TRANSFORMASI KEBIJAKAN NATO (*NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION*) DALAM PENANGANAN  
ANCAMAN NON-TRADISIONAL (STUDI KASUS : *THE 2010 NEW STRATEGIC CONCEPT*)

N A M A : MUHAMMAD NUR SETIA BUDI IRWAN

N I M : E 131 13 014

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 24 Februari 2017

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Aswin Baharuddin, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

TIM EVALUASI

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan segala nikmat-Nya kepada penulis, serta tak lupa penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan yang sempurna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul **Transformasi Kebijakan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dalam Penanganan Ancaman Non-Tradisional (Studi Kasus: *The 2010 New Strategic Concept*)** sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Melalui skripsi ini, besar harapan penulis, tidak hanya sebagai syarat paripurna studi S1, tapi juga mampu menjadi referensi alternatif bagi masyarakat luas yang sedang mengkaji mengenai NATO maupun eksistensi ancaman-ancaman non-tradisional yang muncul di dunia yang terus berubah ini. Penulis akan sangat senang dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi ataupun memberikan masukan, kritikan yang konstruktif, ataupun saran bagi penulis. Penulis dapat dihubungi melalui [mnursetiabudi@gmail.com](mailto:mnursetiabudi@gmail.com).

Skripsi, yang pada akhirnya membawa penulis mendapatkan gelar sarjana ini, penulis persembahkan kepada keluarga penulis. Kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda Irwan Terreng, SE** dan **Ibunda Hj. Astranita Djabbar, SE** yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang senantiasa memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada penulis dan

telah menjadi orang tua yang sangat demokratis dalam keluarga. Teruntuk saudari penulis, **Irnintha Nanda, SE, M.Agr.**, yang telah menjadi mentor sekaligus pembagi semangat dan pengalaman kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. Meskipun kadang ada “intrik-intrik” di antara kita, tapi penulis yakin dari hal-hal tersebut, kita bisa memahami arti dari persaudaraan dan kasih sayang. Teruntuk keluarga kecil ini, terima kasih telah menjadi tempat yang selalu hangat untuk kembali.

Selain itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis tak akan sampai ke titik ini tanpa peranan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan, maupun dalam penyelesaian skripsi ini secara khusus. Oleh karena itu, dengan ini penulis bermaksud untuk menghaturkan terima kasih kepada **Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP** selaku Pembimbing I dan **Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa terbuka dan tak pernah bosan menerima penulis jika ingin konsultasi maupun hanya sekadar mengeluh tentang suka duka penulisan skripsi. Terima kasih atas segala masukan substansial terhadap skripsi penulis hingga senyum dan candaan hangat yang membuat penulis selalu nyaman dalam penyusunan skripsi ini.

Begitu juga dengan **Bapak H. Darwis, MA, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional serta **Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional serta Jajaran Dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Dr. Adi Suryadi B, MA., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA, Bapak**

**Muhammad Nasir Badu, Ph.D, Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si, Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si, Ibu Nur Isdah Idris, S.IP., MA. Ibu Seniwati, Ph.D., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA. Bapak Drs. Imran Hanafi, MA., M.Ec., Bapak Drs. Husain Abdullah, M.Si..** Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di kelas dan special mention bagi kakak-kakak dosen muda HI, **Kak Bama Andika Putra, S.IP., MA** dan **Kak Nurjannah, S.IP., M.Si.**

Hormat dan rasa terima kasih saya kepada **Bapak Dr. Rahmat Muhammad, M.Si** selaku Wakil Dekan III FISIP Universitas Hasanuddin, yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas. Terima kasih telah menjadi ayah kedua bagi mahasiswa-mahasiswi FISIP yang ramah dan sangat menyenangkan.

Tenaga kependidikan, mulai dari Ka. Biro Kemahasiswaan Unhas **Bapak Suprihadi**, Bendahara Unhas, **Bapak H. Sira**, Kabag Minat dan Bakat Kemahasiswaan Unhas, **Ibu Chandra**, beserta **Bapak Ilyas** dan **Bapak Oci** yang telah banyak membantu dalam persiapan seleksi Mawapres 2016. Staff kemahasiswaan FISIP, **Ibu Ija** dan **Bapak Ancu**, staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bunda** dan **Kak Rahma**. Terima kasih atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam pengurusan segala berkas administrasi mulai dari semester 1 hingga semester 8.

Dengan ini pula penulis ingin berterima kasih kepada **Seattle**, angkatan 2013 HI Fisip Unhas yang telah menjadi keluarga baru, tempat berbagi, dan sumber

canda tawa selama kehidupan berkuliah di Unhas. *My sincere grattitude* buat **Ivonne** dan **Mashita** sebagai orang pertama dan selalu ada bagi penulis untuk bercerita tentang apa saja selama ini *even until the dawn*, kawan-kawan partner diskusi mulai dari yang paling penting hingga gosip-gosip tidak jelas yang sekaligus menjadi pengisi kekosongan di *Mace* **Iccang, Akbar, Fajar, Ayat, Aufar, Aldy, Bob, Iswan, Sandi**, kawan-kawan seperjuangan mengurus berkas skripsi dan proposal, **Astari** dan **Ina**, *you guys taught me the value of persistence indirectly, the one and only Enggra* partner makan pisang epe yang cukup temperamen namun gampang terharu, orang-orang yang telah berjasa membuat penulis untuk terus belajar karena ajakan-ajakan brainstorming dari kalian yang kadang tak mengenal waktu dan tempat, **Arfan, Fahirah, Husnul, Eka, Patrik, Upi, Mekay, Kiki, Ilham, Tenri, Beatrix**, sharing bersama kalian semakin memperluas cakrawala pengetahuan penulis, tidak hanya di isu-isu *high politics*. Terakhir, seluruh kawan-kawan Seattle yang tak dapat penulis tulis satu persatu, *it's a gift from God for me having you around, guys*.

Kawan-kawan di Komunitas Simulasi Sidang PBB Unhas, **Ardi, Ayyub, Chandra, Puput, Arfan**, para pendahulu-pendahulu yang telah menjadi inspirasi organisasi, **Kak Biondi, Kak Bama, Kak Riyad, Kak Kiky, Kak Winda, Kak Kharji, Kak Tio, Kak Tillah**, terima kasih telah mengenalkan sebuah organisasi yang tak akan penulis pernah sesali bergabung di dalamnya. Terkhusus untuk para generasi penerus, **Ipeh, Alisha, Kevin, Hep, Nisa, Gandhi, Adin, Amoy, Saras, Loui, Tamira, Fedora, Iqbal, Tita, Farhan, Nabila**, dan semuanya, penulis

percaya kelak di tangan kalian organisasi ini akan jauh lebih baik, *keep striving for the best!*

Saudara-saudari penulis dari berbagai komunitas dan kenalan seperti, Alumni SMA Negeri 5 Parepare angkatan ke 6 (**AN6KER**) yang selalu menghadirkan candaan khas setiap berkumpul, Keluarga Besar **XLFL Batch 4 Kelas Makassar** dan fasilitator terbaiknya, **Cippy**, Teman-teman seperjuangan di **KKN Gelombang 93 Desa Passeno Kecamatan Baranti, Mahasiswa-mahasiswi** pilihan tahun pada ajang **Mawapres2016**, Senior-senior di HI, **Kak Ayu Anastasya, Kak Aumi, dan Kak Ribas**, yang telah menjadi *role model* bagi penulis di tahun pertama perkuliahan. Junior-junior HI, **Aul, Febe, Gandhi, Indah, Raisa, Mario, Umam, Amoy, Mekar dan semua lainnya**. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa kiranya rasa terima kasih dari penulis tidak hanya dinilai sebatas pada ucapan pada kata pengantar ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan kata pengantar ini terdapat kesalahan, dan penulis berharap, skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.

Makassar, 27 Februari 2017

Muhammad Nur Setia Budi Irwan



## ABSTRAKSI

**Muhammad Nur Setia Budi Irwan E131 13 014**, Implementasi the 2010 New Strategic Concept North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam Penanganan Ancaman Non-Tradisional, dibawah bimbingan **Bapak Agussalim** selaku pembimbing I dan **Ibu Pusparida Syahdan** selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi the 2010 New Strategic Concept NATO dalam penanganan ancaman non-tradisional. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Adapun untuk menganalisis data, penulis memakai teknik analisis kualitatif dan untuk pembahasan penulis memakai teknik penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian Konsep Strategis baru NATO dalam menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional telah mempengaruhi beberapa operasi dan misi baru yang diambil NATO setelah Lisbon Treaty tahun 2010. Pada bidang terorisme, NATO memperbarui pendekatannya untuk mengatasi aksi terorisme melalui NATO'S policy guidelines on counter-terrorism pada tahun 2012 dan berpartisipasi pada Global Coalition to Counter ISIL melalui sharing informasi intelijen. Pada bidang sea piracy, NATO pada tahun 2011 mengadopsi konsep The Alliance Maritime Strategy dan melaksanakan Operation Sea Guardian di beberapa wilayah yang rentan akan ancaman pembajakan. Dan pada bidang keamanan siber, NATO telah menyepakati pembentukan NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence di Estonia, dan Cyber Defence Strategy tahun 2011. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem informasi dan komunikasi NATO dan memperkuat pertahanan siber negara-negara anggota NATO. Konsep strategis baru ini telah membawa NATO ke tahap yang lebih luas dalam melakukan upaya menjaga perdamaian dunia dari ancaman-ancaman non-tradisional.

**Kata kunci:** NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Ancaman Non-Tradisional, Konsep Strategis.

## ABSTRACT

**Muhammad Nur Setia Budi Irwan E131 13 014**, *The Implementation of The 2010 New Strategic Concept North Atlantic Treaty Organization (NATO) in Addressing the Non-Traditional Threat*, under the guidance of **Mr. Agussalim** as supervisor I and **Ms. Pusparida Syahdan** as supervisor II, International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin.

*This study aims to explain the implementation of The 2010 New Strategic Concept of North Atlantic Treaty Organization (NATO) in several non-traditional threats such as, terrorism, sea piracy, and cyber threat. To achieve the objectives referred to above, the research method used is descriptive type research. Technique of collecting data used is literature. As for analyzing the data which author use is qualitative analysis, and deductive and technique of writing.*

*The result of this study shows that the implementation of NATO's new Strategic Concept on facing the non-traditional threats has influenced several operations and mission that is taken by NATO after the signing of Lisbon Treaty in 2010. In the field of terrorism, NATO upgraded its approachment to counter-terrorism through NATO's policy guideline on counter-terrorism in 2012 and involved in Global Coalition to Counter ISIL through intelligence and information sharing system. In the field of Sea Piracy, in 2011 NATO adopted the concept of the Alliance Maritime Strategy and conducted Operation Sea Guardian on several territories which are vulnerable to sea piracy. And in the field of Cyber security, NATO established the NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence in Estonia and Cyber Defence Strategy in 2011. These activities aims to strengthen the NATO's cyber capability particularly in communication and information system which is owned by NATO itself as well as NATO's member states. Finally, the Strategic Concept has brought NATO to wider scope of responsibility in the terms of effort to maintain international peace from non-traditional threats.*

**Keywords:** NATO, North Atlantic Treaty Organization, Non-Traditional Threat, Strategic Concept.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>13</b>
1.1 Latar Belakang .....	13
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.4 Kerangka Konseptual .....	19
1.5 Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>31</b>
2.1 Collective Security Sebelum Dan Sesudah Perang Dingin.....	31
2.2 Ancaman Non-Tradisional .....	35
<b>BAB III <i>The 2010 New Strategic Concept</i> NATO .....</b>	<b>58</b>
3.1 Sejarah dan Transformasi NATO .....	58
3.2 Gambaran Umum <i>The 2010 New Strategic Concept</i> .....	73
3.3 Ancaman Tradisional menuju Ancaman Non-Tradisional .....	81
<b>BAB IV Implementasi <i>The 2010 New Strategic Concept</i> NATO .....</b>	<b>86</b>
4.1 Penanganan Ancaman Terorisme.....	86
4.2 Penanganan Ancaman Pembajakan Laut .....	92
4.3 Penanganan Ancaman Kejahatan Siber .....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>111</b>

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 1 Struktur Militer dan Sipil NATO .....</b>	<b>56</b>
--	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perang Dunia kedua memberikan dampak kehancuran yang sangat besar bagi negara-negara di Eropa. Sekitar 36,5 juta jiwa melayang dan 19 juta jiwa diantaranya merupakan warga sipil. Perang tersebut menimbulkan lonjakan angka pengungsi di Eropa dan angka kematian bayi saat itu hingga mencapai 1 kematian dari 4 kelahiran bayi di Eropa. Jutaan anak menjadi yatim piatu dan tidak memiliki tempat tinggal karena pembakaran rumah-rumah dan gedung-gedung semasa Perang dunia kedua berlangsung (NATO, 2016a).

Momentum pasca Perang Dunia kedua merupakan kontestasi antara dua negara pemenang perang yakni Amerika Serikat dengan paham liberalnya, dan Uni Soviet dengan paham komunisnya. Secara cepat, partai-partai komunis yang ada di Eropa mendapat dukungan dari Uni Soviet, menunjukkan eksistensinya dan berupaya menguasai pemerintahan. Pada tahun 1948, Partai Komunis di Cekoslowakia yang dibantu oleh Uni Soviet mampu menggulingkan pemerintahan sah yang berkuasa di negara tersebut.

Pada tahun 1949 diselenggarakan pertemuan antara negara-negara Atlantik utara dan beberapa negara Eropa membahas tentang ancaman bersama yang sedang mereka hadapi. Pertemuan pada saat itu dipimpin oleh diplomat Amerika Serikat, Theodore Achilles yang pada akhirnya mampu menyepakati sebuah dokumen yang bernama *Washington Treaty*, yang selanjutnya menjadi cikal bakal

terbentuknya organisasi pakta pertahanan atlantik utara atau lazim disebut NATO. Pada awal pembentukannya, terdapat 12 negara yang berpartisipasi yakni, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Britania Raya dan Amerika Serikat. Pembentukan pakta pertahanan trans-atlantik ini diharapkan mampu untuk mencegah penyebaran paham komunis di Eropa dan Atlantik utara, serta mencegah tumbuhnya kembali sifat *belligerence* dari negara-negara Eropa. Hingga saat ini, NATO telah memiliki 28 negara anggota.

Menurut website resmi NATO, terdapat tiga hal utama yang melatarbelakangi pembentukan organisasi ini, yakni:

*In fact, the Alliance's creation was part of a broader effort to serve three purposes: deterring Soviet expansionism, forbidding the revival of nationalist militarism in Europe through a strong North American presence on the continent, and encouraging European political integration.*

Kehadiran NATO sebagai pakta pertahanan menjadi representasi kekuatan sekutu dan menjadi penyeimbang kekuatan terhadap Pakta Warsawa<sup>1</sup>, organisasi keamanan yang dibentuk oleh Uni Soviet, sebagai representasi kekuatan komunis di Eropa. Selama Perang Dingin, NATO mengutamakan keamanan bersama bagi negara anggotanya sehingga *peacekeeping* selalu menjadi agenda utama NATO pada saat itu.

Ketika Uni Soviet runtuh dan Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, NATO menjadi satu-satunya organisasi yang berbasis aliansi militer yang masih berdiri. NATO dalam perkembangan organisasinya tidak terlepas dari kebijakan

---

<sup>1</sup> Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur, yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO.

ekspansionis yang ditandai dengan bergabungnya beberapa negara eks penganut paham komunis sebagai negara anggota di NATO seperti, Hungaria, Polandia dan Republik Ceko pada tahun 1997 yang hingga kini terdaftar sebagai anggota tetap NATO.

Dalam dokumen resmi NATO yang berjudul, *What is NATO?* disebutkan bahwa NATO mengedepankan persamaan setiap negara anggota di dalam organisasinya, dimana setiap keputusan substantif yang terbentuk haruslah merupakan keputusan yang bersifat *unanimous* dan konsensus (NATO, 2015). Dari situ kita dapat pahami bahwa NATO menggunakan sistem tersebut guna mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara negara-negara anggota NATO. Dengan menggunakan sistem konsensus, dapat dipastikan bahwa negara-negara anggota NATO menyetujui keputusan yang diambil.

NATO memiliki markas besar di Brussel, Belgia, dimana masing-masing negara anggota mengirimkan duta perwakilannya. Duta perwakilan masing-masing negara anggota ini bertugas menjadi representasi negara dalam dewan NATO yang bertugas sebagai *advisers* dalam setiap pengambilan keputusan dewan. Dewan NATO sendiri disebut dengan *The North Atlantic Council* (NAC) yang beranggotakan para menteri pertahanan negara anggota, dan memiliki wewenang dalam menentukan setiap keputusan organisasi. Badan ini bertemu setiap satu minggu sekali dan mengadakan *summit* setiap satu atau dua tahun sekali untuk memutuskan tantangan bersama dan proyek kerja yang dihadapi aliansi ini.

NATO memiliki dua unit komite dalam pelaksanaannya yakni *civilian committee dan military committee*, keduanya bekerjasama dalam menjalankan NATO. Selain itu NATO juga memiliki Sekretaris Umum (*Secretary General*) yang dipilih setiap 4 tahun sekali, umumnya merupakan politisi senior di negara-negara anggota yang dipilih secara konsensus oleh anggota-anggota NATO. Posisi tersebut saat ini diduduki oleh mantan Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg.

Mengingat perkembangan dan perubahan peran yang dialami NATO pasca Perang Dingin membuat eksistensi organisasi ini diakui oleh dunia, salah satunya melalui organisasi internasional, PBB. Keaktifan NATO dalam mempromosikan kegiatan *peacekeeping* membuat PBB sering memberikan mandat kepada NATO untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian di beberapa konflik yang salah satunya di Libya,

Jika berakhirnya Perang Dingin mampu membawa perubahan fungsional terhadap NATO, periode pasca Perang Dingin juga membawa ancaman-ancaman baru bagi keamanan dunia yang tidak lagi menempatkan negara sebagai aktor atau sumber ancaman utama, ataupun konflik dan perang antar satu negara dengan negara lain. Ancaman-ancaman baru atau yang bisa disebut sebagai ancaman-ancaman non-tradisional ini dapat berupa kejahatan terorisme, pembajakan di laut, hingga teranyar kejahatan di dunia siber.

Untuk merespon hal tersebut, NATO sebagai sebuah organisasi internasional melakukan penyesuaian. Pada tanggal 19 November 2010 diadakan sebuah



pertemuan di Lisbon, Portugal, disepakatilah *The 2010 New Strategic Concept* melalui NATO Summit.

Konsep strategis baru yang dikeluarkan NATO tersebut merupakan wujud penegasan kembali komitmen negara-negara anggota untuk saling melindungi satu sama lain dalam menghadapi ancaman keamanan internasional yang baru, serta ekspansi bidang dan fokus kerja operasi NATO untuk sepuluh tahun kedepan.

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang signifikansi perubahan lingkungan keamanan internasional yang pada akhirnya membuat NATO melakukan pengembangan core task-nya, serta ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi *The 2010 New Strategic Concept* NATO dalam penanganan ancaman-ancaman non-tradisional yang saat ini menjadi ancaman baru dunia. Oleh karenanya, penulis kemudian mengangkat sebuah penelitian berjudul “Transformasi Kebijakan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dalam penanganan ancaman non-tradisional, studi kasus *The 2010 New Strategic Concept*”.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada transformasi kebijakan NATO terhadap penanganan ancaman-ancaman non-tradisional di dunia, yang berlangsung antara tahun 2010 hingga 2016.

Dengan batasan tersebut, berikut merupakan formulasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana Implementasi The 2010 New Strategic Concept NATO dalam penanganan ancaman terorisme?
- 2) Bagaimana implementasi The 2010 New Strategic Concept NATO dalam penanganan ancaman kejahatan siber?
- 3) Bagaimana implementasi The 2010 New Strategic Concept NATO dalam penanganan ancaman pembajakan di laut?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transformasi Kebijakan NATO pada penanganan bidang berikut:

- 1) Penanganan ancaman terorisme
- 2) Penanganan ancaman pembajakan di laut
- 3) Penanganan ancaman kejahatan siber

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami kerjasama regional dan keamanan internasional.
- 2) Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional tentang Transformasi Kebijakan NATO dalam penanganan ancaman non-tradisional.

## 1.4 Kerangka Konseptual

### 1.4.1 Aliansi Militer (*Military Alliance*)

Dalam realisme klasik, ancaman utama sebuah negara adalah negara lain. Telah menjadi konsekuensi logis ketika negara-negara yang merasa keamanan nasionalnya terancam, akan berusaha mencari cara untuk bisa tetap mempertahankan keamanan dan kedaulatan negaranya. Salah satu cara yang paling lazim ditempuh adalah dengan membentuk sekutu atau aliansi militer.

Thucydides, seorang akademisi militer pada abad ke-5 menjelaskan alasan negara-negara pada saat itu membentuk suatu sekutu atau aliansi militer, Menurut Thucydides seperti yang dikutip oleh Kagan, negara-negara pada saat itu bersekutu untuk tiga hal yakni, kehormatan, ketakutan, dan kepentingan. Paul Schroedder seperti yang dikutip oleh Stephen Walt mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang turut mempengaruhi perkembangan aliansi militer di dunia; (1) untuk melawan ancaman, (2) mengakomodasi ancaman melalui sebuah pakta kerjasama, (3) sebagai alat kontrol bagi negara adidaya terhadap negara-negara yang lebih lemah.

Lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Origins of Alliance*, Stephen M. Walt memberikan lima hipotesis dasar yang melatar belakangi pembentukan sebuah aliansi:

1) Balancing – “States facing an external threat will align with others to oppose the states posing the threat.”

Sejarah mencatat bahwa beberapa aliansi terbentuk, baik secara formal maupun informal, merupakan hasil dari pemikiran rasional untuk membentuk

sebuah perimbangan kekuatan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori Balance of Power yang berargumentasi bahwa dibutuhkan perimbangan kekuatan pada sebuah kawasan untuk menghindarkan konflik terjadi di kawasan tersebut. NATO sendiri pada masa Perang Dingin menjalankan fungsi ini sebagai usaha perimbangan melawan Uni Soviet dan Pakta Warsawa,

2) Bandwagoning – *“States facing an external threat will ally with the strongest power- usually a nation that others perceive as more likely to win a conflict.”*

Kecenderungan negara-negara yang lebih lemah untuk bergabung dengan negara yang mereka anggap memiliki peluang besar untuk memenangkan perang atau konflik merupakan alasan rasional dari pembentukan sebuah aliansi. Dalam sejarah, Italia pernah melakukan hal demikian. Pada perang dunia pertama, Italia bersekutu dengan Jerman, Austria-Hungaria karena Jerman dianggap sebagai kekuatan terbesar saat itu setelah peristiwa penaklukan Eropa oleh Otto von Bismarck. Namun seiring berjalannya perang, Italia meninggalkan Jerman kemudian beraliansi dengan Prancis, Britania Raya, dan Rusia, ketika kemampuan Jerman dalam memenangkan perang mulai melemah.

3) Ideology – *“ The more similar the domestic ideology of two or more states, the more likely they are to ally.”*

Salah satu hal yang paling normatif yang melatar belakangi pembentukan aliansi adalah kesamaan ideologi. Kesamaan ideologi bisa diartikan sebagai kesamaan nilai dan kepentingan. Pada perang dunia pertama Rusia beraliansi

dengan Serbia atas dasar nilai *Slavic*<sup>2</sup>. Contoh lainnya adalah Liga Arab yang memiliki kesamaan ideologi dan dasar pembentukannya untuk mempromosikan budaya, keamanan, dan kesejahteraan negara-negara Arab. Kemudian NATO dalam pembukaan *Washington Treaty* secara spesifik menjelaskan demokrasi sebagai dasar ideologi pembentukan organisasi tersebut.

4) Foreign Aid – *“The more aid provided by one state to another, the greater the likelihood that the two will form an alliance. The more aid, the greater control over the recipient.”*

Faktor dependensi juga mempengaruhi terbentuknya sebuah aliansi. Secara sederhana, dijelaskan bahwa ketika sebuah negara mendapatkan bantuan dari negara lain, negara tersebut secara tidak langsung memiliki keterikatan terhadap negara donor. Negara donor lantas diuntungkan dengan memiliki kuasa terhadap negara penerima tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tindakan Uni Soviet yang berusaha mendapatkan kepercayaan dari Kuba dan Nikaragua selama Perang Dingin, dan Amerika Serikat pasca perang duni kedua melalui Marshall Plan in Europe<sup>3</sup>.

5) Penetration – *“The greater one state’s access to the political system of another, the greater the tendency for the two to ally.”*

Contoh dari hipotesis ini adalah hubungan Israel dan Amerika Serikat. Peran lobbyist Israel di Amerika Serikat merupakan faktor penting alasan dibalik

---

<sup>2</sup> Pan-Slavisme adalah gerakan pada pertengahan abad ke-19 yang bertujuan menyatukan semua orang Slavic, yakni etnis linguistik Indo-European yang tinggal di Eropa Tengah, Eropa Timur, Eropa Tenggara, Asia Utara, dan Asia Tengah. Hari ini ada sekitar 350-400 juta orang Slavic.

<sup>3</sup> Marshall Plan adalah bantuan ekonomi dan militer yang diusulkan oleh George Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk pembangunan kembali wilayah Eropa yang rusak akibat terjadinya Perang Dunia Kedua

proteksi keamanan Amerika Serikat untuk Israel. Kemudian pada perang dunia kedua, Turki bersekutu dengan Jerman dikarenakan pengaruh seorang keturunan Jerman yang menjadi Inspektur Jenderal dari tentara Turki waktu itu.

Selanjutnya Walt menambahkan satu lagi hipotesisnya yakni, Detente.

6) Detente – *“The voluntary development of peaceful relations to reduce tensions.”*

Ketidakhadiran ancaman bersama, rasionalitas dari Detente membuat dua atau lebih negara yang saling bermusuhan untuk mengurangi tensi satu sama lain yang akhirnya akan mewujudkan perdamaian bagi negara-negara tersebut. Contohnya ketika aliansi Austria-Hungaria dan Italia pada masa perang dunia pertama dibentuk, aliansi tersebut dibentuk untuk mencegah Italia untuk memerangi sekutu-sekutu dari Austria-Hungaria. Permulaan dari pembentukan NATO pun juga untuk menjaga perdamaian antara negara-negara Eropa yang dulunya saling memerangi satu sama lain.

NATO sebagai sebuah aliansi militer dibentuk berdasarkan empat dari enam hipotesis dasar dari Stephen M. Walt diatas, yakni balancing, bandwagoning, ideology, dan detente. Oleh karena itu juga, keempat faktor tersebut banyak mempengaruhi peranan NATO di masa akan datang.

#### **1.4.2 Liberal Institutionalisme**

Liberal Institutionalisme atau institusionalisme liberal telah banyak dipertimbangkan secara intensif oleh para akademisi sebagai suatu perspektif teoritik yang menentang realis dan neorealis. Studi-studi yang kemudian menjadi

dasar bagi pengembangan perspektif ini menyarankan bahwa cara untuk meraih kemakmuran dan perdamaian adalah bagaimana negara-negara merdeka mengumpulkan sumber daya yang mereka miliki dan bahkan mengurangi beberapa kedaulatan mereka untuk menciptakan komunitas yang terintegrasi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan merespon persoalan-persoalan regional (Lamy, 2001). Keohane dan Nye merupakan dua pemikir yang berada dalam aras ini. Menurutnya dunia saat ini lebih kompleks dan lebih saling terhubung satu dengan yang lain. Menurut Keohane dan Nye, interdependensi yang sangat kompleks ini mempunyai empat karakteristik yaitu:

1. Peningkatan hubungan di antara negara dan non negara,
2. Agenda internasional tidak lagi dibedakan secara tajam antara high politics dan low politics,
3. Pengakuan atas berbagai saluran untuk interaksi di antara negara melintasi batas-batas, dan
4. Menurunnya kekuasaan militer sebagai alat keahlian seorang pemimpin negara. (Lamy, 2001, hal. 213)

Para pemikir yang berada dalam perspektif neoliberal institusionalisme mengidentifikasi adanya empat asumsi pokok, yakni:

1. Negara merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi bukanlah satu-satunya aktor yang signifikan. Mereka selalu berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dalam hampir semua isu,

2. Dalam lingkungan yang kompetitif, negara berusaha memaksimalkan keuntungan melalui kerjasama,
3. Kendala terbesar kerjasama yang berhasil adalah ketidakrelaan atau kecurangan yang dilakukan suatu negara,
4. Kerjasama tidak akan pernah tanpa masalah, tetapi negara akan menggeser sumber daya dan kesetiannya jika mereka melihat keuntungan bersama, dan jika kerjasama tersebut menyediakan suatu peningkatan kesempatan untuk mengamankan kepentingan nasional mereka (Lamy, 2001, hal. 213-216).

Realis dan neoliberal sama-sama memandang pada rasionalisme terhadap perilaku aktor. Aktor selalu mencari cara untuk mencapai kepentingannya. Untuk mencapainya, aktor melakukan maksimalisasi utilitas individu, dan negara dianggap sebagai refleksi atas apa yang diinginkan oleh individu. Dalam level internasional, kepentingan-kepentingan tersebut beretemu dan dinegosiasikan dalam bentuk-bentuk kerjasama. Variasi dalam perilaku aktor dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan pengambilan keputusan. Hambatan-hambatan itu misalnya distribusi kapasitas yang berbeda antara negara satu dengan lainnya, kemampuan penguasaan teknologi, derajat institusionalisasi dalam sistem internasional dan bentuk-bentuk hambatan lainnya dalam lingkungan internasional (Keohane & Martin, 1995). Baik realis dan neoliberal mengakui pentingnya bentuk-bentuk ketidakpastian dalam politik internasional pada umumnya dan rezim internasional pada khususnya. Keduanya sepakat bahwa



sumber dari ketidakpastian itu adalah anarki internasional yang memunculkan dilema keamanan.

Kaum liberal institusionalis meyakini bahwa kerjasama bukanlah sebuah kebetulan, melainkan tindakan yang disadari untuk mencapai tujuan bersama dan institusi internasional ada sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi kerjasama internasional.

Munculnya *mutual interest* dalam negara-negara Eropa untuk bersatu karena alasan sejarah kerapuhan mereka akan perang pada saat awal pembentukan NATO, menjadi alasan utama terbentuknya NATO sebagai pakta pertahanan berbasis militer. Hal ini juga melandasi berbagai kerjasama yang dilakukan negara-negara NATO seperti *collective security* yang dijelaskan oleh kaum liberalis sebagai sistem yang membuat negara-negara menerima bahwa keamanan merupakan concern bersama sehingga membutuhkan respon secara kolektif untuk menghindari agresi. Hal ini melandasi keputusan negara-negara anggota NATO dalam menyusun prinsip kerja secara integratif “*an armed attack against one or more of the... shall be considered an attack against them all.*”

Integrasi, interdependensi serta *Cooperative Security* yang diusung sebagai salah satu prinsip NATO juga dapat dijelaskan melalui perspektif ini. Integrasi dapat dijelaskan sebagai sebuah proses pembangunan *closer union* antar negara dalam lingkup regional maupun internasional. Mitrany menjelaskan bahwa proses ini umumnya didahului dengan apa yang disebut ramifikasi atau proses penyelesaian masalah teknis melalui kerjasama. Sementara interdependensi

merupakan kondisi dimana seorang aktor mendapatkan pengaruh atau dampak dari keputusan aktor lainnya. Sementara perilaku kooperatif yang ditunjukkan oleh *Cooperative Security* identik dengan pandangan liberalis terhadap perilaku positif manusia akan kerjasama, bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kekurangannya,

Secara umum liberal institusionalisme dapat diringkas sebagai berikut. Institusional membantu memajukan kerjasama antara negara-negara, oleh karena itu membantu mengurangi ketidakpercayaan antar negara-negara dan rasa takut negara satu terhadap negara lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional (Ikbar, 2014).

#### **1.4.3 Ancaman Non-Tradisional**

Berbeda dari abad sebelumnya dimana fokus dari ancaman keamanan yang dihadapi negara-negara di dunia adalah kekuatan militer dari negara lain, pada abad ke-21 hal tersebut bukan lagi menjadi masalah utama. Munculnya berbagai aktor non-negara, seperti jaringan teroris, kartel narkoba, dan jaringan pembajak laut, serta konflik internal suatu negara, kini diasumsikan menjadi ancaman keamanan baru pasca Perang Dingin berakhir.

Selain itu degradasi lingkungan yang dialami beberapa negara di dunia sebagai implikasi perubahan iklim dunia juga muncul sebagai ancaman serius bagi eksistensi sebuah negara di masa yang akan datang. Perubahan demografi, seperti populasi yang menua yang dialami negara-negara maju muncul sebagai satu

faktor sosial yang mungkin saja akan memengaruhi kekuatan politik dunia kedepannya.

Kemajuan teknologi pada abad ke-21 secara khusus revolusi pesat yang dialami teknologi, informasi, dan komunikasi memfasilitasi munculnya ancaman di dunia siber seperti *cyber warfare* dan *cyber-espionage* lambat laun memicu pergeseran medan perang dari daratan, laut dan udara ke dunia siber.

Dunia mengalami beberapa dinamika dalam politik internasional pada abad ke-20 semisal pecahnya dua perang dunia, pembentukan tatanan dunia bipolar yang dikuasai oleh dua negara adidaya, beberapa bentuk proxy wars, berakhirnya Perang Dingin, dan pada akhirnya menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa. Pembentukan PBB pasca perang dunia kedua dan kemampuannya dalam membuat sebuah aturan internasional dalam penggunaan kekuatan militer yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan *collective self-defence* atau *collective security*, yang dilegitimasi melalui resolusi PBB, berhasil dan efektif mencegah penggunaan kekuatan militer untuk tindak ofensif ke negara lain oleh negara-negara anggota PBB.

Menurut data World Bank, frekuensi munculnya konflik intra negara dan perang sipil saat ini mulai menurun, dibandingkan dengan yang terjadi pada abad ke-20. Ketika PBB didirikan, tujuan utama organisasi tersebut untuk menyelesaikan konflik ataupun perang sipil yang terjadi pada negara-negara anggotanya. Meskipun begitu konflik saat ini tidak lagi hanya terbatas pada perang antar kekuatan militer dari negara-negara yang ada. Munculnya jaringan

kriminal internasional, telah menunjukkan bahwa aktor non-negara memberikan ancaman lebih besar terhadap keamanan nasional sebuah negara dibanding kekuatan militer negara lain pada abad ini.

NATO sebagai pakta pertahanan pada abad ke-21 juga ikut melakukan reformasi organisasi, yang salah satunya melakukan pendefinisian ulang tentang ancaman terhadap sebuah negara saat ini. Tak heran, NATO terlibat langsung pada beberapa penanganan ancaman-ancaman non-tradisional yang terjadi seperti berkontribusi aktif pada *War on Terror* pasca penyerangan WTC tahun 2001, melakukan Operation Sea Guardian di Tanduk Afrika, serta peningkatan Cyber defence diantara negara-negara anggotanya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini akan menjelaskan bagaimana implementasi The 2010 New Strategic Concept NATO dalam penanganan ancaman-ancaman non-tradisional. Selain itu, metode penelitian kualitatif akan membantu penulis untuk mengetahui kepentingan aktor-aktor yang terlibat.

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan.

Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

### **5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode Library Research untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapat diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta berbagai media lainnya seperti internet, majalah maupun surat kabar harian baik itu cetak maupun daring.

### **5.3 Jenis Data**

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institusi dan lembaga terkait. Adapun data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang implementasi *The 2010 New Strategic Concept* NATO dalam penanganan ancaman non-tradisional

### **5.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan data kuantitatif dapat memperkuat analisis kualitatif.

### **5.5 Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Collective Security Sebelum dan Sesudah Perang Dingin**

Perang Dingin merupakan sebuah momentum dalam sejarah munculnya *collective security dan collective defence* dalam postur keamanan internasional. Tak heran, melalui konsep tersebut melahirkan rivalitas dua organisasi pakta pertahanan internasional, antara NATO dan Pakta Warsawa. Akan tetapi, banyak akademisi memandang bahwa seiring perkembangan zaman, diperlukan redefinisi keamanan kolektif pada masa Perang Dingin dan keamanan kolektif pasca Perang Dingin.

Secara umum keamanan kolektif adalah perjanjian keamanan politik, regional, atau global yang setiap penandatangannya mengakui bahwa keamanan satu pihak adalah kepentingan semua pihak. Semua negara penandatangan berjanji akan memberi respon bersama terhadap ancaman pelanggaran perdamaian. Keamanan kolektif lebih “ambisius” daripada sistem keamanan aliansi atau pertahanan kolektif karena mencakup semua negara di suatu kawasan dan menanggapi berbagai potensi ancaman.

Aleksovski, Bakreski dan Avramovska menjelaskan konsep keamanan kolektif sebagai berikut:

*In a system of collective security, the enemy is a threat to regional or international peace and security. If the system of collective security is international in its reach, a threat can originate in any region, anywhere on the globe. Any nation within the regional or international system that commits aggression, imperils the peace, or grossly exceeds the bounds of civilised behaviour violates the norms of that collective security system and is subject to enforcement*

*action. No nation is excluded from the responsibility of maintaining peace and security regardless of where, within its collective security system, the threat originates. Collective security can be triggered in another way. A threatened nation, exercising its inherent right of collective self-defence, can call on others to help.* (2014, hal. 275)

Konsep keamanan kolektif dijelaskan oleh beberapa teoritis hubungan internasional seperti Michael Joseph Savage, Martin Wright, Immanuel Kant, dan Woodrow Wilson, yang berusaha untuk menerapkan kepentingan terkait keamanan ke dalam area cakupan yang lebih luas (Yost, 1977, hal. 149). Istilah keamanan kolektif juga telah dikutip sebagai salah satu prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebelumnya. Dengan menerapkan sistem keamanan kolektif, PBB berharap untuk mampu mencegah negara anggotanya untuk memberikan ancaman kepada negara anggota lain, atau dengan kata lain mampu menghindari konflik.

Keamanan kolektif, secara bersamaan, menggabungkan dua konsep besar dalam hubungan internasional yakni, *Balance of Power* dan *Global Government*. *Balance of Power* di antara negara-negara cenderung melakukan desentralisasi kekuatan. Negara-negara merupakan aktor yang saling terpisah dan tidak menyerahkan otonomi ataupun kedaulatan negaranya kepada sebuah pusat tertentu. Negara-negara dipahami akan mencari cara untuk mempengaruhi pola distribusi kekuatan dan kemudian menentukan tempat mereka di dalam distribusi kekuatan tersebut (Claude, 1961, hal. 219-221). Harapan akan ketertiban dan perdamaian berangkat dari keyakinan bahwa kompetisi kekuatan antar negara dengan sendirinya akan menciptakan keseimbangan dan dengan cara demikian



akan saling membatalkan satu sama lain untuk menghasilkan sebuah kondisi yang disebut deterensi melalui keseimbangan.

Di sisi yang lain, konsep mengenai *Global Government* adalah sepenuhnya tentang sentralisasi kekuatan. *Global Government* adalah sebuah sistem institusi yang tersentralisasi dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan paksaan layaknya sebuah negara yang berdaulat. Konsep Keamanan kolektif mampu menggabungkan kedua konsep tersebut yang dapat disimpulkan sebagai “ketertiban tanpa pemerintahan”.

Organski menjabarkan lima asumsi dasar terkait teori keamanan kolektif, yakni (Organski, 1960, hal. 373):

- 1) Dalam konflik bersenjata, negara-bangsa anggota akan menyepakati negara mana yang tergolong musuh (agresor).
- 2) Semua negara-bangsa anggota sama-sama berusaha membendung dan mencegah agresi di manapun sumber atau asalnya.
- 3) Semua negara-bangsa anggota memiliki kebebasan bertindak yang sama dan kemampuan untuk bergabung dalam aksi melawan musuh
- 4) Gabungan kekuasaan anggota aliansi keamanan kolektif cukup untuk mengalahkan kekuasaan musuh.
- 5) Karena muncul ancaman kolektif dari negara-negara anggota koalisi keamanan kolektif, negara musuh akan mengubah kebijakannya; jika tidak negara tersebut akan dikalahkan.

Dari kelima asumsi dasar diatas, dipahami bahwa keamanan kolektif tidak hanya fokus pada kekuatan militer saja, tapi juga harus memiliki konsensus dalam

pengambilan keputusan, seperti penentuan musuh dan sekutu, pembagian tugas dan wewenang negara anggota dalam hal terjadi perang/konflik. Selain itu, menurut Organski, dengan keamanan kolektif ini, pihak musuh dipastikan akan mengubah kebijakannya setelah melihat kekuatan dari sebuah aliansi keamanan yang ada.

Lebih lanjut, Morgenthau menyatakan bahwa faktor deterensi, serta kepentingan bersama merupakan dua dari tiga syarat utama dari kesuksesan sebuah keamanan kolektif. Secara umum, berikut merupakan tiga syarat keamanan kolektif agar mampu mencegah terjadinya perang menurut Morgenthau:

- 1) Sistem keamanan kolektif harus mampu mengerahkan pasukan militer yang lebih besar daripada pasukan militer musuh sehingga musuh enggan berusaha mengubah tatanan dunia yang dipertahankan sistem keamanan kolektif.
  - 2) Negara-negara tersebut, yang kekuatan gabungannya dapat dijadikan deterensi (pencegah) sesuai syarat pertama, harus memiliki keyakinan yang sama mengenai keamanan tatanan dunia yang hendak dipertahankan.
  - 3) Semua negara harus meninggalkan perselisihan kepentingannya demi kemaslahatan bersama, yaitu pertahanan seluruh negara anggota.
- (Morgenthau, 1985, hal. 187)

Pasca Perang Dingin, fokus dari keamanan kolektif menjadi lebih variatif. NATO sebagai organisasi dengan basis keamanan kolektif menyusun tugas serta fungsi barunya dengan munculnya beberapa ancaman-ancaman non-tradisional. Dengan begitu, NATO mengalami sedikit perubahan dari organisasi pakta

pertahanan yang mengedapankan *collective defence* menjadi organisasi internasional dengan fungsi *peacekeeping*.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa operasi yang dilakukan oleh NATO di berbagai belahan dunia. Mulai dari NATO yang didukung oleh negara anggotanya gencar menjalankan *War on Terror* pasca tragedi WTC tahun 2001. Tak hanya itu, NATO juga menjalankan fungsi *collective security* untuk menjaga keamanan laut melalui *Operation Sea Guardian*, di Teluk Aden, Laut Merah, dan utamanya di Tanduk Afrika. Yang terakhir, peningkatan kemampuan Cyber Defence di antara negara anggota NATO juga menjadi agenda baru pasca Perang Dingin.

## **2.2 Ancaman Non Tradisional**

### **2.2.1 Terorisme**

Belum ada definisi baku mengenai arti dari Terorisme itu sendiri, karena banyaknya perbedaan persepsi mengenai Terorisme itu sendiri. Perbedaan definisi tersebut menimbulkan permasalahan bahwa pernyataan terorisme memiliki unsur politis. Seperti kasus Israel dan Palestina, Israel dan AS menganggap Palestina adalah terorisme. Dan Palestina menganggap justru Israel dan AS lah yang terorisme, gerakan Palestina adalah gerakan yang menuntut hak untuk berdaulat, bukan aksi terorisme. Bahkan rezim yang berkuasa di suatu Negara, akan menganggap oposisi mereka sebagai ‘terrorist’ pula (Bellamy, 2005)

Banyak yang mengkategorikan kekerasan “*violence*” termasuk dalam terorisme, padahal itu berbeda. Memang semua terorisme didalamnya pasti ada *violence*, namun *violence* tidak semuanya termasuk kategori sebagai terorisme.

Seperti penggunaan kekerasan dalam perang, itu tidak termasuk dalam aksi terorisme.

Berikut macam-macam definisi mengenai terorisme menurut instansi pemerintah ataupun para sarjana yang melakukan riset mengenai terorisme:

Federal Bureau of Investigation (FBI) membagi terorisme menjadi dua, yaitu terorisme domestik, dan terorisme internasional. FBI mendefinisikan terorisme internasional sebagai berikut:

- a. Melibatkan tindakan kekerasan atau tindakan berbahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum federal atau negara bagian.
- b. Bertujuan untuk (i) mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil; (ii) untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau pemaksaan; atau (iii) untuk mempengaruhi perilaku pemerintah dengan penghancuran massal, pembunuhan, atau penculikan.
- c. Melampaui batas-batas nasional (FBI, 2016).

Uni Eropa, selaku organisasi internasional yang berfokus di kawasan regional Eropa, mendefinisikan terorisme sebagai:

*Aksi tersebut memberikan dampak kerusakan yang besar terhadap suatu negara maupun organisasi internasional. Bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat, membuat suatu pemerintahan maupun organisasi internasional tidak dapat berbuat atau abstain menghadapi suatu masalah. Aksi tersebut merusak, dan membuat kacau sistem pemerintahan, konstitusi, ekonomi, dan struktur sosial dari suatu Negara atau organisasi internasional. (European Parliament, 2016).*

Definisi yang dikeluarkan oleh European Parliament tersebut terlihat lebih menekankan pada dampak yang ditimbulkan dari sebuah aksi terorisme, serta bagaimana serangan atau aksi terorisme tersebut ditujukan untuk mengganggu stabilitas sebuah pemerintahan ataupun organisasi internasional.

Dalam *American Heritage Dictionary* edisi ke-4:

“Penggunaan kekerasan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisir; memberikan ancaman, dan bersifat mengintimidasi serta memaksa (American Heritage Dictionary, 2016)”

Walter Laqueur, Chairman of International Research Council at Center for Strategic and International Studies (CSIS):

“Terorisme melegalkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politis kelompok tersebut, dengan menjadikan rakyat sipil sebagai target (United States Institute for Peace, 2016).”

Dari berbagai definisi mengenai Terorisme, Alex J. Bellamy menjelaskan bahwa setidaknya suatu aksi dapat dikategorikan sebagai terorisme jika memiliki empat elemen yaitu: (i) bertujuan politis, dengan menggunakan kekerasan, (ii) dilakukan oleh non-state actor, (iii) target mereka adalah non-combatan, dan (iv) bertujuan untuk membuat rasa takut dalam masyarakat.

Definisi mengenai terorisme diatas meskipun secara umum memiliki kesamaan dalam arti. Namun dalam hal kepentingan di dalam pen-definisian tersebut jelaslah berbeda. Karena perbedaan definisi tersebut dikarenakan adanya kepentingan suatu pihak dalam mendefinisikan terorisme itu sendiri. Secara teknis, aksi terorisme dapat berbentuk: *Assassinations*, penculikan, *hijacking*, bom

bunuh diri atau bombings, cyber attack, dan penggunaan senjata kimia/biologis, nuklir, dan radiological weapons.

Pengkajian tentang terorisme kembali menarik perhatian dunia internasional setelah pada tanggal 11 September 2001 tiga pesawat penerbangan komersil Amerika Serikat dibajak dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar, *Twin Towers World Trade Center* (WTC) dan gedung Pentagon. Peristiwa ini dikenal masyarakat internasional sebagai tragedi 9/11. Kejadian 9/11 ini pula menjadi titik awal masyarakat dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mendeklarasikan perang global melawan terorisme (*global war against terrorism*).

Dewasa ini pemaknaan pengertian umum mengenai terorisme dapat merujuk pada pemaknaan dari PBB:

*Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby- in contrast to assassination-the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victim of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat-and violence-based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought. (Terrorism Research, 2005)*

Dari definisi di atas terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi unsur definisi terorisme, yaitu motif politik, rencana atau niat, dan penggunaan kekerasan. Jika dicermati definisi terorisme ini, maka dapat dilihat bahwa definisi ini hanya melihat dari sisi aksi kekerasan atau violent action dari terorisme. Hal ini dapat diartikan bahwa jika sebuah tindakan yang tidak memakai

aksi kekerasan tetapi mempunyai efek yang sama, tidak masuk dalam definisi tersebut diatas.

Kegiatan terorisme dapat menjadi berskala internasional (terorisme internasional) apabila:

- 1) Diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri
- 2) Dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah atau faksi dari lebih satu negara
- 3) Diarahkan untuk memengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing (Wilkinson, 1977, hal. 177)

Setiap aksi terorisme memiliki motivasi yang berbeda beda tergantung pada kondisinya masing-masing. Tindakan terorisme dapat didasarkan pada dua motif umum, yaitu *objective driven act* dan *terror driven act* (Agung & Yani, 2005).

*Objective driven act* berkaitan dengan tindakan terorisme yang didasarkan pada beberapa permintaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Cara yang biasa digunakan yakni melalui penyanderaan. Bentuk ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bernegosiasi atau mengubah kebijakannya. *Terror driven act* didasarkan pada tindakan balas dendam atau digunakan juga sebagai peringatan atau ancaman kekerasan yang akan terjadi jika pemerintah tidak mengubah kebijakannya.

Motif lain yang dewasa ini sedang banyak terjadi adalah didasarkan pada isu etnis, agama, kesenjangan sosial-ekonomi, dan perbedaan ideologi yang terjadi dalam suatu masyarakat (Henderson, 1997, hal. 153-154).

Sedangkan bentuk-bentuk terorisme internasional dapat berupa:

- 1) *State-sponsored terrorism*, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, Amerika Serikat mengidentifikasi beberapa negara untuk hal ini seperti Kuba, Irak, Iran, Libya, Korea Utara dan Suriah
- 2) *Privately-based terrorism*, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu kelompok terorisme privat, seperti Al Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan sebagainya.

Pada dasarnya tindakan terorisme, dalam menentukan targetnya, memilih target-target yang potensial untuk menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran orang banyak. Sifat terorisme modern adalah siapa saja dapat menjadi korban. Tindakan terorisme ditujukan agar menarik perhatian banyak orang bahkan perhatian internasional dan menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional.

Terdapat 12 perjanjian internasional di bawah naungan PBB yang berkaitan dengan terorisme, yaitu:

- 1) *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention, 1963)*
- 2) *Convention for the Suppression of the Unlawful Seizure of Aircraft Hague Convention, 1970)*
- 3) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention, 1971)*



- 4) *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973)*
- 5) *International Convention Against the Taking of Hostages (Hostages Convention, 1979)*
- 6) *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Nuclear Materials Convention, 1980)*
- 7) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, (1988)*
- 8) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988)*
- 9) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988)*
- 10) *Convention on the Making of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991)*
- 11) *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997 UN General Assembly Resolution)*
- 12) *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)*

Kemudian berkenaan dengan kewajiban setiap negara untuk memerangi terorisme, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang secara teori wajib diikuti seluruh anggota PBB seperti yang tercantum pada pasal 25 Piagam PBB yaitu, “The members of the United Nations agree to accept and

carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter”. Salah satu resolusi Dewan Keamanan PBB adalah resolusi nomor 1386 tanggal 12 September 2001 yang berisikan:

*Calls those state to work together urgently to bring justice the perpetrators, organizers and sponsors of these terrorist attacks and stresses that those responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held accountable.*

Dari sini dapat dilihat bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi universal berkenaan dengan terorisme. Secara teoritis setiap negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk memerangi terorisme dengan segala cara atau by any means. Hal itu dikarenakan kerugian yang disebabkan oleh terorisme adalah sangat besar baik secara finansial maupun nyawa. Dari sisi inilah kemudian dunia internasional mempunyai kepentingan bersama atau common interest untuk mengatasi permasalahan terorisme (Agung & Yani, 2005, hal. 143).

### **2.2.2 Pembajakan di Laut**

Menurut Pasal 101 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Pembajakan Laut mengandung unsur-unsur berikut (International Maritime Organization (IMO), 2017):

1. *any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*
  - 1) *on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;*

- 2) *against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*
2. *any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*
3. *any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).*

Pembajakan di laut menjadi ancaman baru dan meningkat dari tahun ke tahun meskipun usaha-usaha dari organisasi-organisasi internasional telah dilakukan untuk mengurangi upaya pembajakan, menurut laporan *International Maritime Bureau Piracy Report*. Penyerangan skala besar terjadi di pantai Somalia pada tahun 2008 yang menyebabkan penyebaran koalisi angkatan laut internasional menuju Teluk Aden. Sebuah laporan dari *One Earth Future* yang berjudul *Oceans Beyond Piracy initiative* mengestimasi dampak dari pembajakan di Somalia terhadap ekonomi global mencapai angka 7 miliar US Dollar untuk tahun 2011.

Terdapat 439 serangan pembajakan di laut pada tahun 2011, lebih dari setengah dari angka tersebut dilakukan oleh pembajak Somalia yang beraksi di Teluk Aden, Laut Merah, Laut Arab, Samudera Hindia, dan lepas pantai Oman. Tempat pembajakan lain yang terjadi pada tahun 2011 termasuk pada lepas pantai Nigeria dan Benin di Afrika Barat, dan Asia Tenggara, dekat Indonesia. Pada kasus Somalia, analis mengatakan bahwa kebanyakan pembajakan laut terjadi karena inefektifitas otoritas pemerintah di negara tersebut.

Di Asia Tenggara, pembajakan dilakukan untuk merampok kapal-kapal pengangkut hasil laut. Sementara di pembajakan di Laut Cina Selatan mengalami

penurunan pada tahun 2011, jumlah insiden di Indonesia sendiri, mengalami peningkatan menurut IMB. Pembajakan ini banyak terjadi di Selat Malaka. Pada September 2011, Indonesia dan Malaysia menurunkan dua kapal perangnya pada selat tersebut sebagai bentuk bagian dari *joint patrol* untuk mencegah terjadinya pembajakan di daerah tersebut. Beberapa negara juga mengembangkan operasi yang disebut “Eye in the Sky” dengan Singapura dan Thailand. Operasi tersebut melibatkan operasi yang dilakukan dari udara untuk memantau perkembangan keamanan selat tersebut. Akhir September 2011, kepolisian Indonesia menangkap empat perompak yang dianggap bagian dari jaringan pembajakan internasional yang beroperasi pada selat Malaka (Alessi & Hansson, 2016).

Dalam memahami pembajakan di laut, *International Chamber of Shipping* (ICS) mengklasifikasikannya kedalam tiga bentuk yakni:

1. *Low-level Armed Robbery (LLAR)*

Serangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri, biasanya dilakukan pada malam hari. Pelaku akan mengambil segala sesuatu yang dapat mereka bawa dari atas kapal. Kekerasan baru akan dilakukan ketika awak kapal berusaha untuk menghentikan tindakan mereka.

2. *Medium-Level Armed Assault and Robbery (MLAAR)*

Serangan bersenjata dan menggunakan ancaman kekerasan. Perompak biasanya akan memaksa awak kapal untuk menyerahkan uang dan harta benda yang ada di atas kapal, termasuk barang yang ada dalam kargo akan diambil jika memungkinkan. Setiap perampokan akan terjadi biasanya kurang dari satu

jam. Kerugian finansial dalam kategori ini akan mencapai US\$ 10,000 hingga US\$ 20,000.

### 3. *Major Criminal Hijack (MCHJ)*

Merupakan perampokan terencana dan menargetkan keseluruhan kargo sebagai sasaran. Para pembajak biasanya telah mengetahui detil dari kargo dan tempat penyimpanan barang di atas kapal. Beberapa pembajak akan menahan awak kapal di bawah dek kapal, sementara yang lainnya akan memindahkan kargo ke kapal lain. Ketika perompakan telah berakhir, kapal yang dirompak biasanya akan dibiarkan berlayar tanpa dikendalikan oleh awaknya. Tipe perompakan seperti ini biasanya akan menimbulkan kerugian hingga puluhan juta US Dollar dalam sekali serangan (Munich Re, 2006, hal. 16).

### **2.2.3 Kejahatan Siber**

Dewasa ini kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyberspace*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan "*Cyber Crime*" atau kejahatan melalui jaringan

Internet. Munculnya beberapa kasus “*Cyber Crime*” di berbagai negara, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer* komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *Cyber Crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.

*Cyber crime* terjadi bermula dari kegiatan hacking yang telah ada lebih dari satu abad. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah merusak sistem telepon baru negara dengan merubah otoritas. Berikut akan ditunjukkan seberapa sibuknya para hacker telah ada selama 35 tahun terakhir.

Awal 1960 Fasilitas universitas dengan kerangka utama komputer yang besar, seperti laboratorium kepintaran buatan (*artificial intelligence*) MIT, menjadi tahap percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata “hacker” berarti positif untuk seorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya.

Awal 1970 John Draper membuat sebuah panggilan telepon jarak jauh secara gratis dengan meniupkan nada yang tepat ke dalam telepon yang memberitahukan kepada sistem telepon agar membuka saluran. Draper menemukan siulan sebagai

hadiah gratis dalam sebuah kotak sereal anak-anak. Draper, yang kemudian memperoleh julukan “Captain Crunch” ditangkap berulang kali untuk pengrusakan telepon pada tahun 1970-an. Pergerakan sosial Yippie memulai majalah YIPL/TAP (*Youth International Party Line/Technical Assistance Program*) untuk menolong para hacker telepon (disebut “phreaks”) membuat panggilan jarak jauh secara gratis.

Dua anggota dari *California’s Homebrew Computer Club* memulai membuat “blue boxes” alat yang digunakan untuk meng-hack ke dalam sistem telepon. Para anggotanya, yang mengadopsi pegangan “Berkeley Blue” (Steve Jobs) dan “Oak Toebark” (Steve Wozniak), yang selanjutnya mendirikan Apple Computer.

Awal 1980 Pengarang William Gibson memasukkan istilah “cyberspace” dalam sebuah novel fiksi ilmiah yang disebut *Neuromancer*. Dalam satu penangkapan pertama dari para hacker, FBI menggerebek markas 414 di Milwaukee (dinamakan sesuai kode area lokal) setelah para anggotanya menyebabkan pembobolan 60 komputer berjarak dari Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ke Los Alamos National Laboratory. Comprehensive Crime Control Act memberikan yuridiksi Secret Service lewat kartu kredit dan penipuan komputer. Dua bentuk kelompok hacker, the Legion of Doom di Amerika Serikat dan the Chaos Computer Club di Jerman.

Akhir 1980 Penipuan komputer dan tindakan penyalahgunaan memberi kekuatan lebih bagi otoritas federal. Computer Emergency Response Team dibentuk oleh agen pertahanan Amerika Serikat bermarkas pada Carnegie Mellon

University di Pittsburgh, misinya untuk menginvestigasi perkembangan volume dari penyerangan pada jaringan komputer.

Pada usianya yang ke-25, seorang hacker veteran bernama Kevin Mitnick secara rahasia memonitor e-mail dari MCI dan pegawai keamanan Digital Equipment. Dia dihukung karena merusak komputer dan mencuri software dan hal itu dinyatakan hukuman selama satu tahun penjara.

Pada Oktober 2008 muncul suatu virus baru yang bernama Conficker (juga disebut Downup, Downandup dan Kido) yang terkategori sebagai virus jenis worm. Conficker menyerang Windows dan paling banyak ditemui dalam Windows XP. Microsoft merilis patch untuk menghentikan worm ini pada tanggal 15 Oktober 2008. Heinz Heise memperkirakan Conficker telah menginfeksi 2.5 juta PC pada 15 Januari 2009, sementara The Guardian memperkirakan 3.5 juta PC terinfeksi. Pada 16 Januari 2009, worm ini telah menginfeksi hampir 9 juta PC, menjadikannya salah satu infeksi yang paling cepat menyebar dalam waktu singkat.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikkan cyber crime dengan computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai “*any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or presecution.*” (U.S Department of Justice, 2016)”.



Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan *Organization of European Community Development*, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai “*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.* (UNDP, 2007)”

Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.”

Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

#### **2.2.3.1 Karakteristik *Cyber Crime***

Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut:

1. Kejahatan Kerah Biru (*blue collar crime*)

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

2. Kejahatan Kerah Putih (*white collar crime*)

Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.

*Cybercrime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut:

1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

#### **2.2.3.2      *Jenis Cyber Crime***

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

##### **1.    *Unauthorized Access***

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

##### **2.    *Illegal Contents***

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

### 3. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

### 4. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

### 5. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*

*Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

### 6. *Cyberstalking*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena

kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

#### 7. *Carding*

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

#### 8. *Hacking dan Cracker*

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (*Denial Of Service*). Dos attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

#### 9. *Cybersquatting and Typosquatting*

*Cybersquatting* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan

nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

#### 10. *Hijacking*

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak).

#### 11. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan *cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus *Cyber Terrorism* sebagai berikut :

- 1) Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.
- 2) Osama Bin Laden diketahui menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya.
- 3) Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon.
- 4) Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai DoktorNuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

#### **2.2.3.3 *Cyber Crime* berdasarkan motifnya**

Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut :

### 1. *Cybercrime* sebagai tindakan murni kriminal

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webserver, mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

### 2. *Cybercrime* sebagai kejahatan "abu-abu"

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah "abu-abu", cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

#### **2.2.3.4 *Cyber crime* berdasarkan sasaran kejahatan**

Sedangkan berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti berikut ini :

### 1. *Cybercrime* yang menyerang individu (*Against Person*)

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain :

#### 1) Pornografi

Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.

#### 2) *Cyberstalking*

Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

#### 3) *Cyber-Tresspass*

Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya Web Hacking. Breaking ke PC, Probing, Port Scanning dan lain sebagainya.

### 2. *Cyber crime* menyerang hak milik (*Against Property*)

*Cybercrime* yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, carding, cybersquatting, hijacking, data forgery dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain.

### 3. Cyber crime menyerang pemerintah (*Against Government*)

Cybercrime Against Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber terrorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer.

#### **2.2.3.5 Penanggulangan *Cybercrime***

Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap content, computer system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam *cyberspace*. Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya :

#### 1. Mengamankan sistem

Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya kerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan kerusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized actions yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman akan adanya



penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server.

## 2. Penanggulangan Global

*The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah memublikasikan laporannya yang berjudul *Computer-Related Crime : Analysis of Legal Policy*. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah :

- 1) melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya.
- 2) meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
- 3) meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
- 4) meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
- 5) meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime.

### **BAB III**

#### ***THE 2010 NEW STRATEGIC CONCEPT NORTH ATLANTIC TREATY***

#### **ORGANIZATION (NATO)**

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana NATO sebagai sebuah organisasi internasional mengalami perubahan secara substansial dari Perang Dingin ke masa pasca Perang Dingin. Pembahasan akan dimulai dengan sejarah NATO, struktur di tubuh NATO dan Transformasi yang dialami NATO yang dalam hal ini perubahan amanah baru pada konsep strategis NATO.

##### **3.1 Sejarah dan Transformasi NATO**

Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 4 April 1949 yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Atlantik Utara di Washington D.C. Adapun negara-negara yang menandatangani Piagam tersebut ialah 12 negara yang merupakan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara (Belanda, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Luxemburg, Prancis, Portugal, Amerika Serikat dan Kanada (NATO, 2016a).

*Collective security* merupakan landasan terbentuknya NATO. Konsep ini dapat menjelaskan mengapa negara-negara bergabung dalam wadah keamanan bersama. Adanya perasaan tidak aman yang dirasakan oleh suatu negara menyebabkan mereka harus menggabungkan diri dalam satu kekuatan besar sehingga jaminan keamanan atas dirinya semakin besar, dan hal ini terjadi pada negara-negara anggota NATO.

Pada masa Perang Dingin, eksistensi NATO sebagai salah satu kekuatan blok dari dua blok yang muncul, yakni blok barat. Mengingat jumlah negara anggota NATO pada saat itu yang menjadi aliansi pertahanan terbesar yang pernah ada, hal ini memicu pembentukan aliansi atau pakta pertahanan di kubu blok Timur. Pakta Warsawa lantas dibentuk pada tahun 1952 sebagai respon dan upaya penyeimbangan kekuatan terhadap NATO. Rivalitas blok barat yang ditunjukkan NATO dan blok timur direpresentasikan Pakta Warsawa terus meninggi untuk mencegah terjadinya dominasi satu atas yang lainnya.

Dalam operasionalnya, NATO menggunakan prinsip-prinsip yang menjadi landasannya (NATO, 2016e):

1. Solidaritas: berkomitmen menciptakan perdamaian dunia
2. Freedom: menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya
3. Demokrasi: menjaga nilai-nilai demokrasi
4. Trans-atlantic link: membentuk hubungan keamanan transatlantik.

Prinsip-prinsip dasar ini harus dipatuhi oleh anggota NATO secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini memberikan kekuatan bagi NATO dalam setiap melakukan aktivitasnya. Selain itu, prinsip NATO juga tertuang dalam tujuannya, pada Pasal 5 Piagam NATO, “semua serangan militer yang ditujukan untuk melawan salah satu atau lebih negara anggota NATO yang berada di Amerika Utara atau Eropa secara tidak langsung menjadi serangan yang ditujukan kepada seluruh negara anggota, dan menjadi tanggungan bersama.” Jika serangan militer tersebut terjadi, seluruh negara anggota NATO memiliki hak untuk membantu

negara yang diserang dengan memberikan bantuan militer dan pertahanan demi menjaga dan melestarikan keamanan kawasan atlantik utara.

Keanggotaan NATO pada awalnya berjumlah 12 negara. Yunani dan Turki bergabung pada masa Perang Dingin tepatnya pada tahun 1952. Pada 7 Mei 1954 Inggris dan Amerika Serikat menolak upaya Uni Soviet untuk bergabung dalam NATO. Jerman Barat sebaliknya diajak bergabung dalam NATO pada saat itu ditandatangani Persetujuan Paris, 23 Oktober 1954. Jerman Barat dan Italia masuk dalam Western European Union. Enam bulan kemudian Jerman Barat menjadi anggota NATO. 5 Mei 1955 sembilan hari setelah Jerman Barat bergabung dengan NATO, Pakta Warsawa dibentuk. Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia dan Rumania menandatangani Traktat Warsawa, 14 Mei 1955. Secara ideologis para anggota Pakta Warsawa kesemuanya menganut paham komunisme (NATO, 2016b).

Perluasan keanggotaan NATO terus terjadi ketika Spanyol menjadi negara anggota ke 16 pada 30 Mei 1982. Spanyol bergabung dengan NATO. Pada 12 Maret 1986, hasil referendum yang dilaksanakan Perdana Menteri Spanyol, Felipe Gonzales, menunjukkan keinginan rakyat Spanyol untuk tetap berada dalam NATO, tanpa berpartisipasi dalam NATO's *integrated military structure*.

Berakhirnya Perang Dingin dan dibubarkannya Pakta Warsawa tidak menyurutkan hasrat untuk menambah keanggotaan NATO, dengan masuknya Jerman Timur di tahun 1990, Polandia, Cekoslovakia, dan Hungaria pada 12 Maret 1999. Dengan perluasan NATO ini maka perbatasannya jauh bergeser ke timur dan langsung berbatasan dengan Rusia. Di tahun 2004 banyak negara

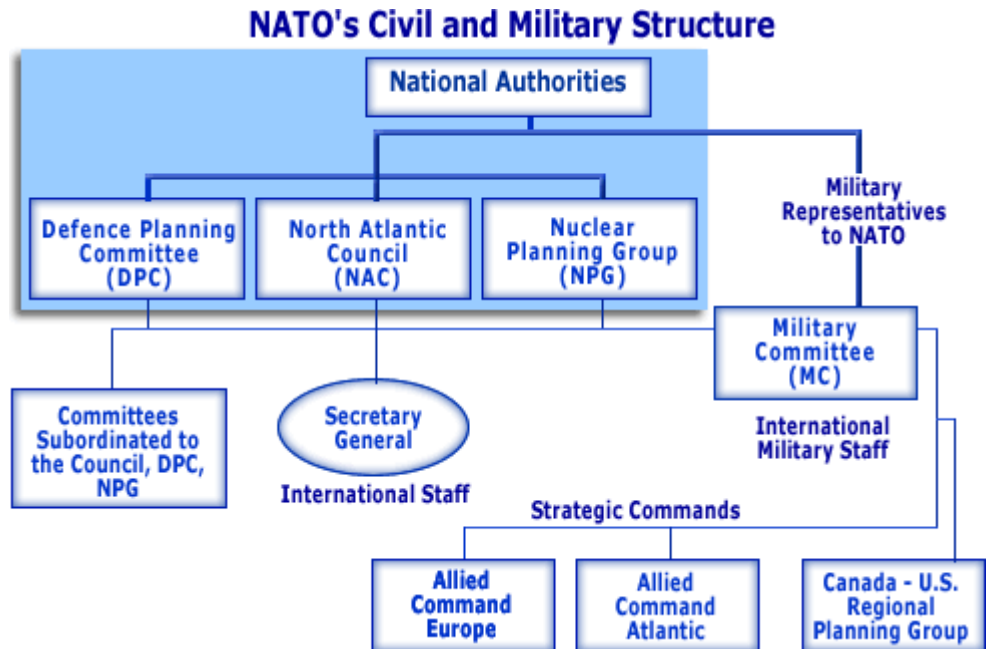
pecahan Uni Soviet yang bergabung dengan NATO diantaranya, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, dan di tahun 2009 Albania dan Kroasia. Para penandatangan perjanjian menyatakan keinginan mereka untuk hidup damai dengan semua negara di dunia dan juga mempertegas prinsip PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan juga untuk menjaga stabilitas wilayah Atlantik Utara.

Adapun yang menjadi tugas utama NATO adalah (NATO, 2006):

1. Menjamin keamanan Eropa dengan berdasarkan demokrasi dan kepercayaan bahwa selalu ada cara-cara damai untuk menyelesaikan suatu konflik.
2. Memberikan kesempatan kepada negara-negara anggotanya untuk saling berkonsultasi satu sama lain dalam setiap hal yang dapat mempengaruhi kepentingan negara-negara anggotanya, termasuk perkembangan yang dapat mengancam keamanannya, dan juga memfasilitasi kerjasama berdasarkan kepentingan bersama
3. NATO berfungsi sebagai penangkal dan sebagai suatu pertahanan dari setiap agresi yang dapat mengancam wilayah negara-negara anggotanya.
4. NATO berfungsi untuk memelihara stabilitas dan keamanan dengan cara membina hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan negara-negara mitranya
5. NATO harus mengembangkan adanya kesamaan wawasan mengenai keamanan internasional dan tujuan dari ditiadakannya kerjasama.

### 3.1.1 Struktur Sipil dan Militer NATO

Bagan 1 Struktur Sipil dan Militer NATO



(Sumber: <http://www.db.niss.gov.ua/docs/nato/nato/sco42.html>)

#### 1. Struktur Sipil

Struktur Sipil NATO sejak awal berdirinya pada tanggal 4 April sudah banyak mengalami perubahan. Perubahan dalam badan-badan NATO dilakukan untuk menyesuaikan kondisi organisasi dengan perubahan lingkungan eksternal pasca Perang Dingin. Tetapi tidak semua badan yang ada dalam NATO mengalami perubahan, seperti Dewan Atlantik Utara (*North Atlantic Council*). Dewan ini masih merupakan pemegang komando tertinggi dalam organisasi NATO. Di dalam *North Atlantic Council* setiap negara memiliki perwakilan yang memiliki tugas untuk membahas isu-isu dan permasalahan yang menyangkut perdamaian dan keamanan negara anggotanya. Di dalam organisasi NATO setiap negara mempunyai hak yang sama, setiap persetujuan dicapai melalui kata

sepakat, dan tidak dilakukan sistem pemungutan suara seperti *voting* atau keputusan dengan suara terbanyak. Keputusan yang diambil pun bersifat mengikat untuk setiap negara anggotanya. Jika ada negara anggota yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil maka hal itu harus disampaikan kepada dewan (NATO, 2016c).

Dalam struktur NATO ada dua badan penting yang mempunyai tugas untuk mengatur jalannya organisasi, yakni *Defence Planning Committee* (DPC) dan *Nuclear Planning Group* (NPG). *Defence Planning Committee* merupakan bagian dari *North Atlantic Council* dan DPC dikepalai oleh Sekretaris Jendral NATO. DPC berfungsi untuk mengatur setiap kegiatan sipil dan militer organisasi (NATO, 2014a). Setiap negara anggota NATO mempunyai perwakilan di dalam DPC kecuali Prancis. *Nuclear Planning Group* (NPG) juga bagian dari *North Atlantic Council* yang terdiri dari seluruh perwakilan menteri-menteri pertahanan negara anggota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPC. Dengan demikian Prancis tidak termasuk dalam NPG. Setiap NPG melakukan pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. NPG memiliki tugas yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan berhubungan dengan masalah persenjataan dan kekuatan nuklir. Pada tahun 2010, DPC dihilangkan dari struktur NATO dan fungsi serta tugasnya dilebur kedalam *North Atlantic Council*.

## 2. Struktur Militer

Eksistensi NATO selama Perang Dingin untuk mencegah adanya ancaman yang dilakukan oleh Uni Soviet. NATO menciptakan suatu strategi yang dapat melindungi Eropa dari ancaman Uni Soviet. Struktur kekuatan NATO tersebut

meliputi penggunaan senjata konvensional dan senjata nuklir. Sejak Perang Dingin berakhir peran NATO mengalami perubahan. NATO tidak lagi hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga perdamaian. Agar dapat efektif dalam melaksanakan fungsinya sebagai penjaga perdamaian, NATO menciptakan suatu badan yang disebut dengan Integrated Military Force.

Dalam Organisasi NATO, keputusan politik untuk mengambil tindakan militer merupakan wewenang dari Sekretaris Jendral. Sekretaris Jendral mendapatkan wewenang tersebut dari *North Atlantic Council*. Dalam NATO terdapat komando tertinggi *Supreme Allied Commanders* yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi militer NATO. Kedua komando tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi semua aset militer di dalam wilayah wewenang tanggung jawabnya masing-masing. SAC terbagi menjadi dua yakni *Supreme Allied Commander Europe* (SACEUR) dan *Supreme Allied Commander Atlantic* (SACLANT) (NATO, 2001, hal. 259). SACEUR bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan kemampuan kekuatan pertahanan yang dibutuhkan di bidang manajemen krisis, kemanusiaan, dan melindungi kepentingan aliansi. Selain itu, SACEUR juga bertindak sebagai juru bicara resmi dari NATO. SACEUR dan SACLANT, masing-masing bertanggung jawab kepada komisi militer (Military Committee) NATO (NATO, 2001, hal. 264).

*Military Committee* NATO (MC) adalah pemegang wewenang tertinggi yang beranggotakan kepala staff militer masing-masing negara anggota. MC berada dibawah kewenangan politik NAC dan DPC. MC mengadakan pertemuan setidaknya tiga kali dalam setahun atau kapanpun diperlukan. MC mempunyai



tugas untuk mengkoordinasi aktifitas-aktifitas militer NATO. Setiap kepala staf memilih perwakilan militer tetap yang berfungsi sebagai anggota komite militer yang dipilih tiga tahun sekali. Hanya Iceland yang negaranya tidak mempunyai kekuatan militer (NATO, 2014b).

Dalam sidang komite, MC mengadakan pertemuan yang dilakukan di markas besar NATO di Brussel untuk mengkaji kembali kekuatan dan strategi militer NATO. Komite militer bertanggung jawab untuk memformulasi dan merekomendasikan kepada badan-badan politik NATO, mengenai tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk menjamin pertahanan bersama dan adanya satu kebijakan untuk tentara NATO yang dikirimkan ke operasi-operasi berbeda. MC membantu untuk mengembangkan konsep strategis aliansi dan melakukan sejumlah penelitian dalam aset NATO. Dalam waktu krisis dan perang, MC dapat berfungsi sebagai suatu badan yang memberikan nasehat kepada DPC mengenai penggunaan kekuatan militer.

Untuk mendukung pekerjaan para stafnya, NATO mempunyai jaringan yang sangat luas. *International Military Staff* terdiri dari para personel militer yang telah dipilih oleh NATO. Bekerja demi tujuan bersama aliansi dan bukan demi negaranya sendiri. Agar dapat mengatur sejumlah besar tugas-tugas yang diberikan, IMS dibagi kedalam lima bagian (NATO, 2001, hal. 242-246):

1. *Planning and Policy division*

Divisi ini bertugas untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan perthanan dan perencanaan strategis NATO dengan Komisi Militer. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penilaian dan mempelajari lingkungan strategis

dimana NATO harus bertindak. Penilaian ini mencakup pengkajian pertahanan yang dilaksanakan setahun sekali, yang berguna untuk menciptakan dan meningkatkan kekuatan militer yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. *Operation Division*

Divisi operasi bertanggung jawab untuk memberi nasehat kepada militer mengenai rencana operasi dan manajemen operasi. Selain itu divisi ini juga bertugas untuk mengkoordinasikan pengiriman sejumlah pasukan dalam setiap organisasi yang dilakukan oleh aliansi

3. *Intelligence Division*

Divisi intelejen bertanggung jawab untuk mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan untuk memperlancar operasi NATO. Divisi intelejen bertugas untuk memonitor setiap kejadian di seluruh dunia dan mendapat informasi dari setiap negara anggotanya.

4. *Cooperation and Regional Security Division*

Divisi kerjasama dan keamanan regional bertugas untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara non-NATO dan menciptakan keamanan di benua Eropa dan di wilayah lainnya di luar Eropa. Divisi ini dalam melakukan tugasnya melibatkan negara-negara non-NATO, seperti pada operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) dan operasi membangun perdamaian (*peacebuilding*).

## 5. *Logistic Armaments and Resource Division*

Divisi ini bertugas untuk menjamin terpenuhinya setiap peralatan yang dibutuhkan oleh NATO dalam melakukan operasinya. Divisi ini bertugas untuk menjamin bahwa pasukan NATO menggunakan persenjataan dan sistem komunikasi yang sesuai dengan jenis operasi yang dilakukannya.

NATO juga mempunyai tiga kekuatan utama (*three primary forces*) yang digunakan untuk membantu setiap kegiatan operasi yang dilakukannya dan untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan strategisnya (NATO, 2001, hal. 258):

### 1. *Immediate and Rapid Reaction Forces*

Pasukan ini merupakan pasukan yang sangat terlatih dan siap siaga untuk dikirimkan dalam setiap misi NATO. Pasukan ini terdiri dari pasukan darat dan laut. Setiap negara anggota yang tergabung dalam *Integrated Military Structure* saling bergantian untuk menjaga kesiapan unit-unit pasukannya dan siap siaga penuh apabila terjadi suatu krisis.

### 2. *Main Defence Forces*

Tugas pasukan ini adalah mencegah negara lain melakukan tindakan agresi terhadap negara-negara anggota NATO. Kekuatan ini terdiri dari kekuatan konvensional dan kekuatan nuklir yang bertugas untuk menangani setiap ancaman yang mungkin terjadi terhadap anggota NATO. Ada empat pasukan multinasional yang ditempatkan di Jerman. Pasukan ini juga dapat digunakan sebagai penjaga perdamaian.

### 3. *Augmentation Forces*

Pasukan ini merupakan pasukan cadangan NATO. Pasukan ini dapat digunakan untuk memperkuat pasukan NATO yang sedang bertugas kapanpun jika diperlukan.

#### 3.1.2 Transformasi NATO

NATO mulai mengalami krisis eksistensi pada awal dekade 90-an. Berakhirnya Perang Dingin dengan runtuhnya Pakta Warsawa bukan hanya menjadi kemenangan besar bagi negara-negara anggota NATO melawan ancaman paling nyata bagi mereka yakni Uni Soviet, tapi juga menjadi permulaan debat berkepanjangan mengenai apakah NATO masih memenuhi dibutuhkan oleh negara-negara anggotanya, dan dunia internasional secara umum.

Menurut Lord Ismay, Sekjen pertama NATO, peran dari NATO selama berlangsungnya Perang Dingin adalah untuk mengusir Rusia, memberi jalan bagi AS, dan tetap mengontrol Jerman. Jika mengacu dari pernyataan tersebut tentu saja saat ini, NATO telah melenceng jauh dari tujuan pembentukannya. Runtuhnya komunisme, terpecahnya Uni Soviet dan pulihnya kekuatan Jerman telah membuat tujuan NATO tadi menjadi anakronistik.<sup>4</sup> Meskipun begitu, pada satu sisi, NATO dapat dikatakan sebagai pemenang, tapi di sisi lain dapat dikatakan NATO yang dulunya menjadi kekuatan *collective defence* dan *deterrence* bagi Eropa Barat melawan Pakta Warsawa yang digunakan sebagai alat pada Perang Dingin, mengapa masih harus ada (Gordon, 1997).

---

<sup>4</sup> Anakronistis: menjadi tidak cocok dengan zaman tertentu

Fungsi utama berdasarkan pasal 5 piagam NATO ialah pertahanan kolektif bagi negara-negara anggotanya. Tetapi NATO, terlepas dari keberadaannya sebagai organisasi yang melindungi seluruh negara anggota dari ancaman Uni Soviet, juga menjadi arena bagi institusionalisasi hubungan antara negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat. Bagi beberapa pengamat, NATO dianggap sebagai organisasi yang terdiri dari negara-negara yang memiliki nilai-nilai kesepahaman yang sama ketimbang negara-negara yang memiliki ancaman yang sama. Bagi mereka yang berpandangan seperti ini, NATO dapat dibedakan dari sebuah organisasi yang secara eksklusif dengan tujuan militernya, karena NATO memiliki konsep yang lebih luas dengan komunitas trans-atlantik berdasar pada nilai-nilai bersama.

Hal diatas dapat dijadikan sebagai jawaban bagi mereka yang skeptis tentang pentingnya keberadaan NATO pasca Perang Dingin. NATO saat ini mulai muncul dengan misi-misi baru mereka yang menawarkan dan mempromosikan nilai-nilai Barat ke seluruh dunia seperti demokrasi dan ekonomi liberal. Dengan misi-misi baru tersebut, NATO menyusun kerangka kerja yang bersifat lebih umum dengan landasan keamanan bersama. Inisiatif-inisiatif baru pun diambil oleh NATO misalnya saja melakukan perjanjian dan kerjasama dengan negara-negara yang bukan anggota NATO, begitu juga dengan area cakupan misi yang lebih bervariasi. Meskipun demikian, tetap saja NATO masih menghadapi beberapa kendala yang harus diselesaikan jika NATO berharap peran baru ini dapat tercapai dengan baik.

1. NATO dari *Collective defence* menjadi *Collective Security*

Pada dasarnya transformasi NATO dari sebuah organisasi yang mengedepankan keamanan kolektif lantas menjadi keamanan bersama dapat ditelaah melalui dua paradigma besar dari Hubungan Internasional yakni Realisme dan Liberalisme.

Menurut para realis, politik internasional merupakan “*a continuous and vigorous struggle for power in an anarchic environment*”. Dari definisi itu dapat dilihat bahwa kepentingan nasional sebuah negara memainkan peran vital dan krusial dalam bentuk interaksi *zero-sum game*<sup>5</sup> hubungan antar negara, dan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang mereka ambil. Melalui bentuk interaksi seperti ini, konsep *Balance of Power* lantas yang menjaga kestabilan hubungan antar negara. Pada masa Perang Dingin, NATO dikonsepsikan sebagai organisasi yang menyediakan perimbangan kekuatan terhadap Pakta Warsawa sehingga hingga Perang Dingin berakhir tak ada korban jiwa yang jatuh meskipun suasana kompetisi antar kedua Pakta Pertahanan tersebut sangat kental (Snyder, 1999, hal. 105-106).

Dari perspektif Liberal Institusional tetap menerima pentingnya kehadiran sebuah kekuatan militer di dalam hubungan internasional, namun juga menekankan pentingnya hukum internasional dan kebutuhan akan kerjasama antar negara melalui insititusi untuk menjaga stabilitas dari sistem internasional (Baylis & Smith, 2005, hal. 307).

---

<sup>5</sup> Zero-sum game merupakan kondisi dimana setiap hubungan antara satu negara mempunyai implikasi negarif terhadap keamanan negara lain yang mengganggu keseimbangan dan kestabilan perdamaian

Norma internasional, menurut para liberalis, memiliki peran fundamental dalam keberlanjutan status quo sistem internasional. Lebih lanjut, hukum internasional yang dihasilkan dari sebuah institusi internasional akan menghasilkan resolusi-resolusi bagi konflik dan pada akhirnya akan menghapuskan perang yang terjadi (Baylis & Smith, 2005, hal. 9). Dengan kata lain, norma internasional yang disepakati negara-negara dari keputusan organisasi internasional dianggap mampu menjadi instrumen untuk mencegah dan bahkan menyelesaikan konflik antar negara.

Lebih lanjut, keamanan kolektif, menurut para liberal, bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik melalui pembentukan sebuah komunitas kekuatan yang berbasis tidak hanya doktrin sebagai deteransi bagi potensi ancaman dalam level internasional, tapi juga untuk mengubah interaksi antar negara yang dulunya bersifat kompetisi menjadi kerjasama. Pendekatan Wilsonian dan Kantian yang berusaha menggantikan sistem *Balance of Power* dengan sistem baru yang dilandasi *community power* (Yost, 1977, hal. 11). Organisasi yang berlandaskan keamanan kolektif akan bersifat inklusif dan memiliki komitmen diantara negara anggotanya untuk merespon segala potensi ancaman bagi stabilitas sistem yang mereka bangun (baik internal maupun eksternal) meskipun tidak begitu berkaitan dengan tujuan atau kepentingan dari organisasi tersebut.

Jika mengacu pada dua teori diatas, transformasi yang dialami NATO akan dapat lebih mudah untuk dijelaskan. Pada masa Perang Dingin, peran dari NATO sesuai dengan pertahanan kolektif yang dijelaskan sebelumnya. Penandatanganan Piagam NATO pada tahun 1949 membentuk sebuah persekutuan antara Amerika

Utara dan Eropa Barat guna menjaga keseimbangan di benua Eropa pasca Perang dunia kedua, dan menjamin keamanan negara-negara anggotanya. Ancaman bagi sekutu pada saat itu jelas dan spesifik yakni, Uni Soviet. Fungsi dari aliansi pada saat itu fokus pada deterensi dan pertahanan bagi negara-negara anggota.

Kepemimpinan Bill Clinton di Amerika Serikat turut mempengaruhi evolusi yang terjadi pada NATO pada tahun 2000. NATO pada saat itu tidak lagi melihat negara sebagai ancaman utama, akan tetapi NATO berkomitmen untuk berperan aktif pada konflik-konflik yang akan datang di negara-negara lain. Kepemimpinan Clinton di Amerika Serikat perlahan tapi pasti mengubah NATO dari sebuah organisasi *collective defence*, yang awalnya kepentingan dari organisasi banyak ditentukan oleh Amerika Serikat, menjadi sebuah organisasi *collective security* yang lebih fleksibel dalam penentuan kebijakannya (Asmuss, 2002, hal. 18)'.

## 2. Tugas dan Mitra baru NATO

Seperti yang telah disebutkan diatas, fokus dari NATO mengenai aktifitas keamanan dan militer telah bergeser secara signifikan. Pada masa Perang Dingin, prioritas utama ialah deterensi nuklir, namun saat ini sudah tak lagi menjadi fokus utama. Aktifitas NATO pun telah keluar dari wilayah yang biasanya menjadi tempat beroperasi ke wilayah non-anggota NATO. NATO juga membangun hubungan dengan negara-negara non NATO dalam hal keamanan bersama. Pada tahun 1991 di Roma, untuk pertama kalinya NATO mengeluarkan sebuah konsep strategis. Melalui konsep strategis tersebut, NATO membangun hubungan kerjasama baru dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur (CEECs) dan menjadikannya sebagai bagian penting NATO.



NATO mulai mengembangkan kerangka kerja dan menyelenggarakan forum untuk mendukung hubungan baru tersebut. Pada Desember 1991, dibentuk *North Atlantic Cooperation Council* (NACC), pada Januari 1994 dibentuk *Partnership for Peace* (PfP) program, yang memperdalam kerjasama dan sebagai forum konsultasi keamanan antara NATO dengan negara-negara CEECs. Pada tahun 1997, *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC) dibentuk yang menjadi forum komunikasi antara negara-negara Eropa dan negara-negara di Atlantik, negara-negara CEECs juga diundang untuk bergabung kedalam EAPC. Pada tahun 1999, dibentuk sebuah *Membership Action Plan* (MAP) ditujukan bagi negara-negara CEECs yang tertarik untuk menjadi anggota penuh NATO. Pada Washington summit tahun 1999, NATO meluncurkan *Defense Capabilities Initiative* yang berisi tugas baru bagi pasukan NATO khususnya pada bidang penanganan krisis dan intervensi.

Berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan NATO pasca Perang Dingin, terlihat jelas jika NATO mencoba untuk memperluas definisi dari keamanan. Melalui program-program seperti NACC atau PfP, terlihat bahwa NATO mencoba menjangkau aktifitas yang lebih luas dan tidak begitu berkaitan dengan keamanan dan militer.

### **3.2 Gambaran Umum The 2010 New Strategic Concept NATO**

Piagam NATO atau *The North Atlantic Treaty of 1949* merupakan dokumen yang menandai berdirinya NATO pada tahun 1949. Dokumen tersebut dikaji secara serius dari berbagai pihak baik dari internal NATO maupun dari kalangan akademisi. Piagam NATO tersebut pun secara berkala diperbarui berdasarkan

kebutuhan dan tantangan yang dihadapi NATO. Piagam tersebut berisikan komitmen dari negara-negara anggota NATO terhadap perdamaian internasional, keamanan dan keadilan, kebebasan individu, promosi mengenai prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan aturan hukum organisasi. Piagam NATO ini pun masih relevan dengan cita-cita dan prinsip-prinsip yang juga diusung oleh Perseikatan Bangsa-bangsa, termasuk penyelesaian sengketa antar dua atau lebih negara. Isi dari Piagam NATO juga mencakup usaha konsultasi (Pasal 4), bantuan bersama jika serangan bersenjata dialami oleh salah satu negara anggota (Pasal 5), dan keterbukaan organisasi dalam menerima anggota baru (Pasal 10).

Konsep strategis pertama dikeluarkan pada tahun 1991 pasca usainya Perang Dingin dan selanjutnya mengalami revisi pada tahun 1999. Akan tetapi, konsep strategis tersebut dianggap usang dan tidak relevan pada masanya, mengingat konsep strategis tersebut disetujui sebelum terjadinya beberapa peristiwa besar yang berkaitan langsung dengan isu keamanan internasional seperti, serangan teror 9/11, Misi NATO ke Afghanistan, Perang Irak. Konflik Rusia-Georgia, dan mulai munculnya ancaman-ancaman non-tradisional yang membutuhkan penanganan tidak hanya melalui pendekatan militer. Meskipun begitu, muncul keengganan untuk melakukan revisi ulang terhadap dokumen tahun 1999 dari beberapa negara-negara anggota. Hal ini dikarenakan terjadinya perpecahan pendapat di antara negara-negara anggota NATO mengenai hal utama yang harus menjadi fokus NATO pada saat itu.

Konsep Strategis baru disepakati pada Lisbon Summit yang dihadiri oleh pimpinan negara-negara NATO pada 19 November 2010 yang berjudul “*Active*

*Engagement, Modern Defence*”. Konsep baru ini sebanyak 11 halaman, atau setengah dari jumlah konsep strategis sebelumnya.

### **3.2.1 Lisbon Summit tahun 2010**

Lisbon Summit pada tahun 2010 merupakan pertemuan antara kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara anggota NATO yang dilaksanakan pada Lisbon, Portugal pada tanggal 19 dan 20 November 2010. Pada pertemuan inilah negara-negara anggota NATO mengadopsi sebuah konsep strategis baru yang menjadi rencana dan pedoman pelaksanaan organisasi untuk 10 tahun kedepan menggantikan konsep strategis sebelumnya yang disepakati pada tahun 1999 di Washington Summit.

Sebagai tambahan, konsep strategis baru ini membahas masalah tantangan-tantangan modern yang akan dihadapi oleh Aliansi seperti terorisme dan serangan siber, negara-negara anggota juga menyepakati usaha pengembangan teknologi pertahanan misil sistem.

Negara-negara anggota NATO bertemu dengan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai membahas tentang operasi yang sementara dilaksanakan oleh NATO di negara tersebut. Pada pertemuan tersebut, NATO dan pemerintah Afghanistan bersepakat untuk mengurangi pasukan tempur NATO secara berkala hingga paling akhir pada 2014. NATO tetap menegaskan komitmennya kepada Afghanistan untuk menyediakan pelatihan dan konsultasi bagi kekuatan militer dan kepolisian Afghanistan.

*The strategic concept* adalah dokumen resmi yang berisikan tentang tujuan dan sumber dari tugas keamanan yang dimiliki NATO. Dokumen tersebut juga

memperkenalkan fungsi utama organisasi terkait dengan lingkungan keamanan yang baru, pendekatan aliansi terhadap keamanan, serta menyediakan garis pedoman untuk perubahan kekuatan militer NATO.

Singkatnya, konsep strategis menjadi instrumen bagi NATO untuk menghadapi tantangan ancaman yang ada dan menjadi pedoman dalam pembangunan politik dan militer NATO. Konsep strategis terbaru telah disepakati pada Lisbon Summit, November 2010, mencerminkan bahwa NATO mengalami transformasi dalam lingkungan keamanan dan transformasi dalam tubuh aliansi NATO itu sendiri. Terdapat beberapa ancaman keamanan yang mulai muncul dan berkembang utamanya sejak serangan teroris 9/11, krisis manajemen yang pernah dilakukan oleh NATO di Balkan dan Afghanistan, dan nilai penting kerjasama dengan berbagai pihak di dunia, semuanya membuat NATO kembali meninjau ulang konsep strategisnya.

The 2010 Strategic Concept yang berjudul “*Active Engagement, Modern Defence*” sangat jelas dan merupakan pernyataan tegas mengenai tugas utama dan prinsip kerja NATO, nilai-nilai dalam aliansi, dan lingkungan keamanan yang berevolusi, serta strategi dan tujuan Aliansi untuk satu dekade kedepan.

Setelah mendeskripsikan NATO sebagai sebuah komunitas yang memiliki kesamaan nilai yang berkomitmen pada prinsip-prinsip kemerdekaan individu, demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum, konsep strategis baru ini juga memperkenalkan tiga tugas utama NATO yakni, *collective defence, crisis management, and Cooperative Security*. Konsep strategis baru ini juga

menekankan solidaritas internal Aliansi, pentingnya konsultasi trans-atlantic, dan kebutuhan akan reformasi keorganisasian secara berkelanjutan

Dokumen ini juga menjelaskan mengenai lingkungan keamanan yang berkembang saat ini, dan mengidentifikasi kemampuan yang harus dimiliki NATO dan kebijakan yang harus diambil untuk memastikan pertahanan dan deterensi NATO dari ancaman tersebut, begitu juga dengan fungsi manajemen krisis yang harus siap dan cukup untuk menghadapi ancaman yang ada. Ancaman yang dimaksud dapat berupa proliferasi misil balistik dan senjata nuklir, terorisme, serangan siber, dan permasalahan lingkungan. Konsep strategis ini juga menegaskan bagaimana NATO bertujuan untuk mempromosikan keamanan internasional melalui kerjasama dengan. Hal ini dapat ditempuh melalui, pengendalian perdagangan senjata, perlucutan senjata, dan usaha nonproliferasi nuklir, memperkenalkan kebijakan Open Door bagi setiap negara Eropa yang ingin bergabung dengan NATO dan secara signifikan memperluas persekutuan dengan negara-negara di luar Eropa. Bersamaan dengan itu, NATO juga akan tetap melanjutkan proses reformasi dan transformasinya

### **3.2.2 Prinsip dan Tugas Utama NATO**

Setelah menegaskan tujuan abadi NATO dan nilai-nilai dan prinsip organisasi ini, Konsep Strategis menyoroti tugas inti dari organisasi ini. Lingkungan keamanan modern saat ini membawa beberapa tantangan baru dengan cakupan yang lebih luas bagi negara-negara anggota NATO. Untuk memastikan keamanannya, NATO harus dan tetap memenuhi dan menjalankan tiga tugas

utama, yang kesemuanya akan berkontribusi pada perlindungan negara-negara anggota NATO dan tetap berkesesuaian dengan hukum internasional yang berlaku:

#### 1. *Collective defence*

*The 2010 Strategic Concept* menjelaskan bahwa *collective defence* adalah tanggung jawab terbesar aliansi, dan deterensi berdasarkan pada gabungan dari ancaman kekuatan nuklir dan kemampuan militer konvensional, masih tetap menjadi elemen penting dari strategi NATO. Konsep strategis baru ini juga menyediakan pendekatan komprehensif untuk menjaga dan mengembangkan kemampuan dari aliansi ini untuk melawan ancaman yang sudah ada maupun yang baru muncul. Ancaman yang dimaksud dapat berupa proliferasi senjata nuklir, pertahanan misil balistik, dan senjata pemusnah massal dan penggunaannya untuk kejahatan terorisme, serangan siber, dan ancaman-ancaman yang datang dari degradasi lingkungan.

Negara-negara anggota NATO akan selalu membantu satu sama lain menghadapi serangan terhadap salah satu negara anggota NATO. Sesuai dengan pasal 5 dari *Washington Treaty*. Komitmen ini tetap mengikat dan tegas bagi seluruh negara anggota. NATO akan mencegah dan membendung segala ancaman agresi, ataupun tantangan keamanan yang membahayakan keamanan salah satu negara atau Aliansi secara keseluruhan.

#### 2. *Crisis management*

NATO sedang mengadopsi sebuah pendekatan holistik dalam hal penanganan krisis, mempertimbangkan keterlibatan NATO pada setiap tahapan krisis: “

NATO *will therefore engage, where possible and when necessary, to prevent crises, manage crises, stabilize post-conflict situations and support reconstruction*". Pendekatan baru yang terdapat pada konsep strategis baru ini, mendorong negara-negara anggota NATO untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dan berkoordinasi dalam usaha-usaha penanganan krisis terjadi. Hal ini termasuk pada pelatihan dan pengembangan kemampuan militer lokal serta usaha dalam mengembangkan hubungan yang baik antara masyarakat sipil dan militer sebuah negara.

NATO memiliki kemampuan militer dan politik yang unik dan kuat untuk menangani berbagai macam spektrum krisis, sebelum, sementara dan setelah konflik. NATO secara aktif akan mengirim bantuan yang dapat berupa militer, politik ataupun gabungan keduanya untuk menangani krisis yang dianggap dapat berpotensi memberi dampak keamanan bagi keamanan aliansi, sebelum krisis tersebut menjadi konflik, untuk menghentikan konflik yang berdampak pada keamanan aliansi, dan untuk membantu dalam hal konsolidasi stabilitas kawasan pasca terjadinya konflik yang dapat mendukung keamanan dan perdamaian kawasan *Euro-Atlantic*.

### 3. *Cooperative Security*.

Negara-negara anggota NATO dapat terkena dampak dan juga dapat memberi dampak pada perkembangan politik dan keamanan diluar kawasan Aliansi. NATO akan secara aktif untuk mempertahankan keamanan internasional melalui kerjasama dengan negara-negara relevan dan organisasi internasional lainnya, dengan sevara aktif mengontrol perdagangan senjata, non proliferasi nuklir serta,

tetap membuka pintu bagi negara-negara Eropa yang ingin bergabung dengan NATO yang telah lebih dulu memenuhi persyaratan NATO.

Bagian terakhir dari the 2010 Strategic Concept berfokus pada mempromosikan keamanan internasional melalui kerjasama. Akar dari kerjasama ini ialah prinsip dalam mencari keamanan *“at the lowest possible level of forces”* melalui mendukung kontrol terhadap penjualan senjata, perlucutan dan non proliferasi. NATO juga akan tetap membantu menjalankan usaha-usaha dalam konteks area tersebut dan akan menjalankan beberapa inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan itu. Hal ini merupakan penegasan kembali dari komitmen NATO untuk mencapai *“our goal of a Europe whole and free and sharing common values”*.

Komponen penting dari pendekatan kooperatif menuju keamanan dari NATO ini adalah kerjasama yang dikembangkan antara NATO dan negara-negara non-NATO, begitu juga dengan organisasi dan aktor internasional lainnya. Konsep strategis yang baru ini menggambarkan NATO yang lebih inklusif, fleksibel dan terbuka untuk kerjasama dengan rekan kerja NATO dari seluruh dunia utamanya kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. NATO, melalui konsep strategisnya ini, juga mengupayakan kemungkinan kerjasama strategis antara NATO dan Rusia dan menegaskan kembali komitmennya untuk mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Mediterania dan kawasan Teluk.



Akhirnya, Konsep Strategis ini menggambarkan maksud NATO yang akan memaksimalkan efisiensi kerja, meningkatkan metode kerja organisasi dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki dengan lebih bijak sesuai dengan prioritas-prioritas yang telah mereka identifikasi melalui konsep strategis ini.

### **3.3 Ancaman Tradisional menuju Ancaman Non-Tradisional**

Dimensi pertama yang perlu kita ketahui dari konsep keamanan adalah “the origins of threats”. Bila pada Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar/eksternal sebuah negara maka pada masa kini, ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global. Dalam hal ini, ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti etnis, budaya, dan agama.

Pada tahun 1994 saja misalnya 18 peperangan dari 23 peperangan yang terjadi di dunia diakibatkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama, dan etnis. Sementara itu, 75 persen dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lainnya didorong oleh alasan yang sama pula. Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalankan PBB ditujukan untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di berbagai konflik antar etnis di dunia.

Dimensi kedua adalah “the nature of threats”. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah mengubah sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi jauh

lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan HAM.

Alhasil sebagaimana dikemukakan Peter Chalk, fenomena global kontemporer diwarnai oleh fenomena abu-abu. Fenomena ini secara longgar dapat didefinisikan sebagai ancaman-ancaman terhadap keamanan stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor negara dan non-negara (Chalk, 2000).

Akibatnya isu-isu yang mengemuka pun semakin beragam. Isu-isu baru ini meliputi: konflik SARA; ketidakamanan ekonomi, dan degradasi lingkungan termasuk pula kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi dan kimia oleh aktor negara dan non negara.

Mengemukanya berbagai isu di atas sebagai sifat-sifat baru ancaman berkorelasi amat kuat dengan dimensi ketiga yakni changing response. Bila selama ini respon yang muncul adalah tindakan kekerasan/militer semata, maka kini isu-isu tersebut perlu pula diatasi dengan berbagai pendekatan non militer. Dengan kata lain, pendekatan keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya digeser oleh pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial-budaya.

Dimensi berikutnya yang juga akan mengarahkan kita pada perlunya perluasan penekanan keamanan non-tradisional adalah changing responsibility of

security. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah organisasi politik terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu para penganut konsep keamanan baru menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini dikarenakan human security merupakan agenda pokok di muka bumi ini dan oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar sesama individu. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama transnasional antara aktor non negara.

Dimensi terakhir adalah core values of security. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada national independence, kedaulatan, dan integritas teritorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini antara lain penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas (transnational crime) baik itu perdagangan narkoba, money laundering dan terorisme (Agung & Yani, 2005, hal. 123-126).

Perlindungan terhadap nilai-nilai baru di atas menjadi puncak mengemukanya keamanan non-tradisional dalam konteks global kini. Mengemukanya berbagai konflik komunal di sekitar kita tentunya tidak dapat dilepaskan dari 2 persoalan besar: perkembangan yang terjadi di dunia internasional atau globalisasi dan semangat partikularisme domestik dan transnasional yang merupakan reaction

against globalization. Globalisasi telah memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok, dan sistem sosial yang melewati dan atau bahkan menghapus batas tradisional negara. Dengan demikian globalisasi memunculkan aktor-aktor baru seperti gerakan separatis, kelompok penjahat lintas batas dan kelompok-kelompok terorisme internasional.

Perbedaan antara ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional dapat dipahami dengan membandingkan asumsi dasar dari keduanya. Ancaman tradisional memiliki asumsi dasar yakni (1) fenomena politik dan hubungan internasional adalah tentang negara dan kepentingannya yaitu, mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan, (2) tidak ada kewenangan lebih tinggi dari kewenangan negara, (3) kepentingan keamanan didefinisikan secara sepihak oleh negara (4) kestabilan internasional tergantung pada distribusi kekuatan yang seimbang (*balance of power*), (5) Negara tidak bisa menggantungkan kepentingan keamanannya pada negara lain dan *struggle for power* bersifat permanen, (6) Hubungan antara negara bersifat *zero sum game*.

Terlihat jelas bahwa pendekatan tradisional sangat bersifat negara-sentris dan tidak menghendaki terjadinya kerjasama antar negara dalam upaya penciptaan perdamaian mengingat hubungan internasional akan selalu bersifat konfliktual, sehingga masing-masing negara harus memperjuangkan sendiri kepentingan nasionalnya.

Sedangkan pendekatan non-tradisional mengasumsikan ancaman kepada enam hal yakni (Agung & Yani, 2005, hal. 126-128):

1. Keamanan seluruh entitas politik di bawah negara (*non-state actors*)
2. Negara menghadapi tekanan dari lingkungan domestik dan lingkungan internasional
3. Negara menyerahkan kedaulatannya kepada entitas internasional
4. Keamanan bersifat multidimensional dan kompleks tidak hanya bersifat ancaman militer
5. Negara dan kedaulatannya tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas masalah keamanan
6. Negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara

Terlihat jelas bahwa pendekatan non-tradisional memahami ancaman dengan cakupan yang jauh lebih luas dan memasukkan keamanan individu di dalamnya. Dimensi keamanan yang perlu dijaga, menurut pendekatan non-tradisional, juga termasuk pada keamanan ekonomi, lingkungan dan hak asasi manusia.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI *THE 2010 NEW STRATEGIC CONCEPT NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION* (NATO)**

Konsep strategis baru yang dimiliki oleh NATO secara resmi telah berlaku sejak disepakatinya pada Lisbon Summit pada 19 November 2010. Melalui konsep strategis itu mengarahkan NATO untuk pengembangan dan pengawasan terhadap beberapa tantangan dan ancaman baru yang dianggap mampu memberikan dampak terhadap negara-negara anggota NATO. Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada bagaimana implementasi konsep strategis baru dari NATO ini mempengaruhi operasi NATO dalam menangani ancaman kejahatan terorisme, pembajakan laut, dan kejahatan siber.

Pada bidang terorisme, setelah disepakatinya konsep strategis baru pada tahun 2010, NATO memperbarui pendekatannya terhadap penanganan ancaman terorisme melalui *guideline* baru. Untuk menangani ancaman pembajakan laut, NATO mengeluarkan Alliance Maritime Strategy serta Operation Sea Guardian, dan untuk memperkuat pertahanan siber organisasi NATO maupun negara-negara anggota NATO, dibentuklah NATO *Cooperative Cyber Defence Center of Excellence* yang diperkuat dengan *Cyber Defence Strategy* dan *Cyber Defence Pledge*. Kesemuanya akan lebih detail dijelaskan dibawah ini.

#### **4.1 Penanganan Ancaman Kejahatan Terorisme**

NATO untuk pertama kali dalam sejarahnya mengaktifkan klausul *collective defence*-nya pasca serangan 9/11 di Amerika Serikat. Hal ini dapat dipahami

bahwa NATO menganggap terorisme merupakan ancaman bagi keamanan negara-negara anggota NATO dan juga stabilitas perdamaian internasional dalam skala yang lebih luas. Terorisme telah membuktikan kemampuannya untuk melakukan aksinya dalam lintas negara, mengembangkan jaringan internasional, menentukan target hingga pelaksanaan atau eksekusi akhir dari serangan terorisme.

#### **4.1.1 NATO's *policy guidelines on counter-terrorism 2012***

Teknologi modern meningkatkan potensi teroris untuk mendapatkan senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologis, radioaktif ataupun nuklir (CBRN). Instabilitas atau konflik dalam negara dapat memicu penyebaran terorisme seperti tumbuhnya ideologi ekstrim, intoleransi dan gerakan-gerakan fundamentalis.

Respon NATO terhadap terorisme dimulai pada saat dijalankannya *Operation Active Endeavour* tahun 2001, dan pengadopsian *Military Concept for Defence against Terrorism*. Selama satu dekade terakhir, NATO telah melakukan beberapa kemajuan pada beberapa area penting operasi NATO seperti perluasan operasi, peningkatan pertukaran informasi intelijen, dan pengembangan teknologi sebagai solusi melalui program *Defence against Terrorism Programme of Work and Science for Peace and Security Programme*.

NATO's *policy guidelines on counter-terrorism* berfokus pada tiga prinsip yakni *awareness*, *capabilities*, dan *engagement* (NATO, 2012):

##### **1. *Awareness***

Sebagai dukungan terhadap pemerintah negara-negara anggota, NATO memastikan penyebaran pemahaman akan ancaman terorisme melalui konsultasi,

pertukaran informasi intelijen dan analisis serta asesmen strategis secara berkelanjutan

Pelaporan informasi intelijen pada NATO didasarkan pada kontribusi kekuatan intelijen yang dimiliki NATO baik internal maupun eksternal, baik sipil maupun militer. Konsep strategis baru yang disepakati pada tahun 2010 juga meningkatkan kemampuan dari NATO *Intelligence Unit* yang mampu bekerja lebih baik dan menghasilkan laporan analisis yang berkaitan dengan terorisme dan jaringannya dengan ancaman transnasional lainnya.

NATO mengundang ahli dari berbagai *background* untuk memberikan pandangan kepada NATO terkait hal-hal yang berkaitan dengan usaha melawan terorisme. Diskusi dengan organisasi internasional lainnya seperti, PBB, Uni Eropa, OSCE, dan *Global Counterterrorism Forum* (GCTF) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komunitas internasional dalam menangani ancaman terorisme bersama-sama dengan usaha yang dilakukan NATO.

## 2. *Capabilities*

NATO berjuang untuk memastikan aliansi ini memiliki kemampuan yang memadai untuk mencegah, menjaga dan melawan ancaman terorisme. Pengembangan kemampuan dan peningkatan teknologi merupakan tugas besar NATO dalam menghadapi ancaman asimetris seperti terorisme dan penggunaan senjata-senjata non-konvensional. Usaha-usaha ini dilakukan melalui kerangka *Defence Against Terrorism Programme of Work* (DAT POW), yang bertujuan



untuk melindungi pasukan, masyarakat sipil, dan gedung-gedung penting dari serangan yang dilancarkan oleh teroris seperti bom bunuh diri, penggunaan bahan peledak, serangan roket dari pesawat maupun helikopter dan serangan yang menggunakan unsur kimia, biologis, ataupun radioaktif.

Defence Against Terrorism Programme of Work dikembangkan sejak *Conference of National Armaments Directors* (CNAD) pada tahun 2004. Fokus utamanya adalah pengembangan solusi dari sisi teknologi dalam menghadapi serangan teroris, namun saat ini tugasnya telah diperluas ke tingkat yang lebih komprehensif seperti pelatihan, uji coba, pengembangan prototipe hingga konsep penanggulangan terorisme

Penyebaran dan potensi penggunaan senjata pemusnah massal dan adanya kemungkinan senjata tersebut jatuh ke tangan teroris diakui sebagai ancaman utama bagi NATO. Oleh karenanya NATO menempatkan prioritas utama pada pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal kepada negara dan aktor-aktor non negara yang mengandung zat-zat kimia, biologi, radio aktif dan nuklir yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan negara-negara anggota NATO.

### 3. *Engagement*

Usaha internasional dalam melawan terorisme membutuhkan pendekatan holistik. NATO telah memperkuat hubungannya dengan negara rekanan kerja serta aktor-aktor internasional lainnya. *Counter terrorism* merupakan salah satu dari lima prioritas dari NATO *Sciences Peace and Security* (SPS) Programme.

The SPS Programme meningkatkan kerjasama dan dialog antara ilmuwan dan ahli dari negara-negara anggota dan rekan kerja NATO, yang bertugas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ancaman terorisme. Aktivitas dari SPS Programme ini meliputi workshop, kursus pelatihan, riset serta pengembangan proyek yang berkontribusi dalam mengidentifikasi, metode dalam perlindungan gedung atau infrastruktur penting, suplai dan personel pasukan, faktor manusia dalam pertahanan melawan terorisme, teknologi untuk mendeteksi bahan peledak.

NATO bekerjasama dengan PBB, Uni Eropa dan OSCE untuk memastikan kesamaan pandangan dan informasi yang dibagi dan tindakan yang sesuai dapat diambil secara lebih efektif dalam melawan terorisme. The UN Global Counter Terrorism Strategy, konvensi dan protokol internasional, bersama dengan resolusi PBB yang relevan, menyediakan kerangka kerja yang sama dalam menghadapi ancaman terorisme.

#### **4.1.2 Pencapaian NATO dalam Penanganan Terorisme pasca Implementasi The 2010 New Strategic Concept**

Konsep strategis NATO yang diadopsi pada Lisbon Summit, November 2010, menyatakan bahwa terorisme merupakan ancaman langsung terhadap keamanan negara-negara anggota NATO dan juga terhadap stabilitas internasional pada cakupan yang lebih luas. Konsep strategis baru ini meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan bertahan dari teroris internasional melalui

analisis ancaman, konsultasi dengan rekan kerja NATO hingga pengembangan kemampuan militer.

Pada *Chicago Summit*, para pemimpin negara NATO memperkenalkan pedoman kebijakan baru untuk usaha counter terrorism NATO, yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan ancaman terorisme, kemampuan yang memadai, dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain serta aktor-aktor internasional lainnya (*awareness, capabilities, engagement*).

Pada *Warsaw Summit*, Pimpinan negara-negara NATO memutuskan untuk menyediakan bantuan melalui NATO untuk melawan ISIL. NATO AWACS akan menyediakan informasi bagi *Global Coalition to Counter ISIL*. NATO akan mulai melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan (*capacity building*) di Irak, sementara pelatihan terhadap ratusan pasukan Irak di Jordania juga tetap dilanjutkan. NATO juga akan memperkuat kerjasama yang sementara berjalan dengan Jordania dalam bidang pertahanan siber. NATO juga akan melaksanakan pertukaran informasi dengan negara-negara yang terlibat dengan *Global Coalition to Counter ISIL* (NATO, 2017).

Meskipun isu terorisme telah menjadi ancaman bagi negara-negara anggota NATO sejak pertama kali tragedi 9/11 terjadi. Konsep Strategis baru NATO telah memperkuat dan mengembangkan kemampuan NATO dalam merespon dan mencegah aktifitas terorisme internasional. Meskipun harus diakui NATO sempat mengalami keteledoran dalam mencegah terjadinya beberapa serangan terorisme

yang terjadi tiga tahun terakhir, terlepas dari operasi dan misi yang dijalankannya untuk mencegah serangan terhadap negara anggotanya.

Pada kasus serangan terorisme di Paris tahun 2015 yang memakan korban hingga 113 jiwa, *North Atlantic Council* sebagai pemegang komando tertinggi di badan NATO tidak mencapai kata sepakat untuk mengaktifkan klausul pasal 5 piagam NATO. Begitu juga ketika meledaknya sebuah bom di kota Brussel, Belgia, yang notabene menjadi kota di mana markas besar NATO berada, Pasal 5 Piagam NATO tetap tidak dilaksanakan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa, *collective defence* pada NATO tetap membutuhkan *collective agreement* pada proses pengambilan keputusan di *North Atlantic Council* (NAC).

## **4.2 Penanganan Ancaman Pembajakan Laut**

Keamanan maritim merupakan salah satu agenda penting NATO. Sebagai bagian dari the 2011 *Alliance Maritime Strategy*, NATO telah melaksanakan operasi maritim yang disebut dengan Sea Guardian. Operasi ini tercipta melalui kesepakatan pada *Warsaw Summit*, Juli tahun 2016. Operasi ini mencakup wilayah keamanan maritim yang luas dan saat ini sedang beroperasi di Laut Mediterania.

### **4.2.1 *The Alliance Maritime Strategy 2011***

Lautan menghubungkan negara-negara yang ada dunia menjadi sebuah satu jaringan kerjasama ekonomi, finansial, sosial dan politik. Menurut statistik, 70% dari Bumi ditutupi oleh air dan 80% dari total populasi dunia hidup kurang dari 100 mil dari garis pantai, 90% dari perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut, dan 75% dari perdagangan tersebut melalui perairan internasional. Lingkungan

maritime termasuk jalur perdagangan, pelabuhan, pos pengisian, dan infrastruktur lainnya seperti pipa saluran, penyimpanan minyak dan gas alam , dan kabel telekomunikasi *trans-oceanic*.

Sebagian besar proses perdagangan dunia menggunakan transportasi internasional maritim yang menggunakan biaya operasi yang rendah dan melalui jalur distribusi yang rawan. gangguan dalam perjalanan terhadap proses pengiriman barang akan mempengaruhi aktifitas perdagangan dunia yang di dalamnya tentu saja terdapat negara-negara anggota NATO. Sebagai tambahan, laut menyimpan sumber daya maritim yang sangat berharga di dalam lautan sehingga penjagaan dan pemeliharaan *freedom of navigation*, jalur perdagangan laut, infrastruktur vital di laut, perlindungan sumber daya maritim dan keselamatan lingkungan adalah semua kepentingan yang diperjuangkan oleh NATO di bidang maritim.

Di saat yang bersamaan perairan dan lautan di dunia dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kejahatan internasional dan kegiatan terorisme, termasuk pengiriman dan penggunaan senjata pemusnah massal atau benda yang berbahaya serupa. Aktifitas kejahatan yang terjadi pada lingkungan maritim mencakup pada fakta peningkatan serangan bajak laut, yang membahayakan keselamatan kru kapal dan penumpang kapal. Permasalahan yurisdiksi tentang kapal dagang yang menggunakan *Flags of Convenience* <sup>6</sup> namun memiliki kru dari berbagai negara

---

<sup>6</sup> Kapal yang menggunakan Bendera Kebangsaan Negara yang tidak sama dengan Kebangsaan dari pemilik kapal tersebut. Biasanya pemilik kapal ingin menghindari pajak nasional, menghindari peraturan-peraturan pelayaran internasional, membayar upah pelaut di bawah standar

semakin mempersulit keamanan di laut. Globalisasi telah mengurangi hambatan yang dapat menimbulkan aktifitas kriminal di laut seperti perdagangan manusia, senjata dan narkoba.

Terkait dengan fakta-fakta di atas NATO melalui *Alliance Maritime Strategy* memiliki empat fungsi utama untuk membantu menjaga keamanan maritim untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan negara-negara anggota NATO, yakni:

1. *Deterrence and Collective defence*

Deterensi dan pertahanan kolektif, termasuk deterensi nuklir tetap menjadi fokus utama dalam komitmen NATO pada bidang politik dan militer. Deterensi akan mengandalkan kemampuan militer NATO yang telah teruji, latihan persiapan, dan komunikasi strategis yang efektif untuk mencegah atau melawan agresi jika terjadi. Peran yang mungkin juga akan dijalankan kekuatan maritim NATO dalam pertahanan misil dapat menjadi bagian penting dari respon NATO terhadap proliferasi nuklir dan senjata pemusnah massal.

Peran pertahanan bersama dan deterensi NATO pada the Alliance Maritime strategy akan meliputi tugas sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan upaya deterensi nuklir sesuai dengan amanah konsep strategis NATO

---

ITF, tidak menggunakan pelaut yang memiliki kemampuan dan sertifikasi yang diakui secara internasional.

- 2) Menyediakan pasukan cepat tanggap termasuk kemampuan untuk mengirimkan pasukan secara cepat untuk menghadapi musuh dengan menggunakan kapal tempur pasukan amfibi.
- 3) Mempertahankan kemampuan untuk menyebarkan, mempertahankan dan mendukung pasukan ekspedisi yang efektif melalui komunikasi pengendalian jalur laut, kemampuan penanggulangan penambangan yang efektif, dan kemampuan untuk memaksa masuk jika diperlukan serta untuk melakukan serangan ke darat.
- 4) Memastikan bahwa pasukan NATO memiliki kebebasan bertindak melalui beragam cara pengintaian dan dengan penggunaan alat berpresisi tinggi
- 5) Memberikan kemampuan pertahanan rudal balistik berbasis laut, menawarkan fleksibilitas strategis sebagai kontribusi untuk perlindungan pasukan NATO di garis depan dan untuk perlindungan wilayah NATO dan populasi negara-negara anggota NATO terhadap ancaman rudal balistik sesuai dengan keputusan yang diambil pada Lisbon Summit.

## 2. *Crisis management*

Manajemen krisis aliansi dapat mencakup pencegahan konflik, operasi penyelesaian konflik, operasi tanggap krisis, penciptaan perdamaian, operasi embargo, kontra-terorisme, pembersihan ranjau. Meskipun fokus utama dari operasi tanggap krisis biasanya di darat, pasukan maritim dapat memainkan peran penting dalam operasi embargo senjata, mendukung operasi darat, penurunan pasukan amfibi untuk operasi darat, logistik dan bantuan dukungan, pengawasan dan pengintaian dari laut. Untuk tujuan ini, tugas NATO akan mencakup:

- 1) Terus mempertahankan pasukan gabungan yang modern, kredibel dan cepat tanggap yang mampu beroperasi pada lingkungan dengan jaringan komunikasi yang terbatas. Pasukan NATO harus mampu mengamankan kontrol terhadap lalu lintas laut, meluncurkan serangan amfibi, menyediakan markas operasi di laut, melaksanakan kerjasama dengan angkatan laut dari negara non-NATO dan organisasi internasional lainnya, dalam rangka memberikan keamanan dari atas dan dari bawah laut.
- 2) Berkontribusi pada penyediaan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam sesuai dengan kerangka kerja politik NATO dalam partisipasinya pada operasi kemanusiaan.

Memanfaatkan kemampuan yang dimiliki pasukan maritim untuk menyediakan respon cepat terhadap situasi krisis yang terjadi, termasuk penegakan perdamaian, penegakan hukum embargo dan zona larangan terbang, kontra-terorisme dan evakuasi masyarakat sipil.

- 3) Menyediakan bantuan logistik bagi pasukan operasi gabungan pada area/lingkungan musuh dan penyebaran komando gabungan dan basis logistik di permukaan laut

### 3. *Cooperative Security: Outreach through Partnerships, Dialogue and Cooperation*

*The Alliance Maritime Activities* memiliki kontribusi penting terhadap kebijakan NATO dalam bidang partnership, dialog dan kerjasama. Aktivitas-aktivitas tersebut menawarkan kesempatan besar bagi untuk mencegah konflik,



mengembangkan keamanan dan stabilitas kawasan melalui dialog, dan transparansi antar negara anggota. Selain itu, NATO juga dapat bekerjasama dengan negara-negara non-NATO dalam melaksanakan pertukaran informasi tentang keamanan maritim.

Operasi militer NATO dapat memperkuat *partnership*, dialog dan kerjasama melalui:

- 1) Berperan aktif pada aktifitas diplomatik termasuk melalui kunjungan ke pelabuhan sebagai bagian aktifitas rutin oleh *Standing NATO Maritime Groups*
- 2) Berkontribusi, jika dibutuhkan, pada peningkatan kemampuan rekan operasi NATO dalam menangani ancaman keamanan pada lingkungan maritim dan beroperasi secara efektif disana
- 3) Melaksanakan latihan bersama, seminar, dan uji coba bersama

Melalui pelaksanaan ketiga dari operasi NATO diatas hal ini juga sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Konsep Strategis NATO yang baru. Tidak hanya menekankan pada operasi militer dalam mencapai tujuannya, tapi juga memperkuat peranan kekuatan diplomatik NATO sebagai sebuah aliansi pertahanan sekaligus organisasi internasional guna memperkuat hubungan dengan organisasi internasional lainnya ataupun dengan negara-negara non-NATO dalam setiap kegiatannya.

#### 4. *Maritime security*

Sesuai dengan hukum internasional (termasuk perjanjian yang berlaku dan hukum adat), kontribusi operasi maritim dan kegiatan untuk keamanan maritim akan memerlukan:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan patroli, berbagi informasi yang didapatkan, dalam mendukung penegakan hukum pada aktifitas NATO, melaksanakan operasi keamanan maritim sesuai kerangka kerja yang telah disetujui oleh Dewan Atlantik Utara, baik di dalam ataupun diluar dari teritori NATO.
- 2) Memelihara kemampuan pasukan maritim NATO untuk melaksanakan misi interdiksi termasuk dalam dukungan terhadap penegakan hukum dan dalam pencegahan transportasi dan penggunaan senjata pemusnah massal. Pasukan maritim NATO juga akan siap dan mampu untuk mendukung perlindungan akan kebebasan navigasi di perairan internasional.

Kedua hal tersebut akan dapat dipenuhi oleh NATO jika mampu bekerja sama dengan berbagai pihak baik negara-negara anggota NATO sendiri maupun organisasi-organisasi internasional dan negara-negara non-NATO. Oleh karena itu, hal ini pun telah berkesesuaian dengan prinsip *active engagement* dari konsep strategis baru NATO.

#### 4.2.2 *Operation Sea Guardian*

Operasi *Sea Guardian* merupakan operasi maritim yang disepakati NATO melalui Warsaw Summit pada Juli 2016 yang akan melaksanakan tujuh tugas berdasarkan persetujuan Dewan Atlantik Utara, yakni (NATO, 2016d):

- 1) *Support maritime situational awareness*: tugas ini akan berfokus pada pembagian informasi antara NATO dan pihak ketiga untuk memperkuat NATO *Recognised Maritime Picture* (RMP)
- 2) *Uphold freedom of navigation*: NATO harus siap dan mampu bertindak sesuai dengan prinsip kebebasan navigasi baik dalam situasi perang maupun tidak. Ini mencakup pada pengawasan, patroli, operasi khusus, dan penggunaan pasukan.
- 3) *Conduct maritime interdiction*: penggunaan pasukan cepat tanggap atau pasukan khusus disertai ahli senjata kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (CBRN) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai membawa senjata yang dilarang
- 4) *Fight the proliferation of weapons of mass destruction*: mencegah pengiriman dan penggunaan senjata pemusnah massal, yang akan melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan dan mengamankan bahan CBRN ilegal yang ada di laut
- 5) *Protect critical infrastructure*: Berdasarkan permintaan dari anggota NATO ataupun non anggota NATO yang disetujui oleh Dewan Atlantik Utara,

NATO akan membantu melindungi gedung atau infrastruktur penting di lingkungan maritim termasuk kontrol pada pelabuhan bongkar-muat

- 6) *Support maritime counter-terrorism*: Termasuk pada perencanaan dan pelaksanaan operasi untuk mencegah, menghentikan, melindungi, dan bertahan dari aktifitas teroris di lautan dengan penggunaan pasukan
- 7) *Contribute to maritime security capacity-building*: NATO dapat berkontribusi melalui pengembangan keamanan maritim baik melalui pendekatan militer maupun pendekatan non militer.

Operasi yang dilakukan NATO berkaitan dengan keamanan maritim dapat dipahami sebagai bentuk pengejawantahan dari crisis management, satu dari tiga fokus utama yang ditekankan oleh Konsep Strategis baru NATO. Laut menjadi tempat banyaknya kejahatan terjadi. Meskipun tidak akan memberikan dampak kerusakan fisik yang signifikan terhadap negara-negara anggota NATO, mengingat negara-negara anggota NATO tidak semua merupakan negara maritim, fakta bahwa lautan menjadi jalur perdagangan internasional menjadi alasan mengapa NATO harus turun tangan mengamankan laut. Perdagangan internasional yang melalui lautan jika mengalami gangguan secara pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan akan mengganggu stabilitas ekonomi negara-negara anggota NATO.

Laut Mediterania, Teluk Aden, perairan Somalia, merupakan wilayah dimana NATO menjalankan misi maritimnya. Selain menjalankan fungsi crisis

management, operasi ini merupakan manifestasi dari peran baru NATO pasca Perang Dingin yakni, *peacekeeping* dan *peacebuilding* di dunia.

#### **4.3 Penanganan Ancaman Kejahatan Siber**

Banyak negara saat ini mengakui bahwa kemampuan dan teknologi keamanan siber adalah hal yang penting untuk dimiliki dan menjadi salah satu alat strategis dalam hubungan internasional selain diplomasi, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer. Hal ini juga mendorong kekhawatiran bahwa pada masa yang akan datang perang akan berpindah dimensi ke dimensi siber. Perlu dicatat juga bahwa saat ini, banyak aktor internasional non-negara memiliki kekuatan siber yang perlu untuk diperhitungkan.

Konsep Strategis baru NATO yang mengidentifikasi beberapa bentuk ancaman baru yang mungkin saja dihadapi oleh NATO ataupun negara-negara anggota NATO secara individu. Oleh karena itu, NATO merasa perlu untuk mengembangkan kemampuan pertahanan siber yang mereka miliki. NATO merasa bertanggung jawab dalam perlindungan jaringan komunikasi dan digital yang mereka miliki, mengingat hampir dari keseluruhan operasi yang dijalankan NATO didukung oleh teknologi siber, sehingga tidak mengherankan jika Cyber defence menjadi ranah vital bagi NATO saat ini.

Prioritas kedua ialah membantu negara-negara anggotanya dalam mengembangkan fasilitas dan kemampuan pertahanan sibernya masing-masing. Hal ini diwujudkan melalui salah satu cara yakni dengan penyamaan standar teknologi dan fasilitas serta standar operasional prosedur dalam teknologi pertahanan siber mereka yang diatur dalam pembentukan *Cyber Defence Strategy*. Kemajuan yang

dicapai melalui cyber defence strategy ini secara ditinjau secara berkala. Selain itu, NATO juga memberikan edukasi, pelatihan, dan uji coba melalui berbagai institusi pendidikan termasuk, *NATO School* di Oberammergau dan *Cyber Academy* di Portugal. *NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence* di Tallinn, Estonia, juga memainkan peran penting dalam masalah ini.

Jika digabungkan, aktifitas-aktifitas diatas ditujukan untuk memperkuat kemampuan dan teknologi pertahanan siber NATO. Pelaksanaan tiga tugas utama NATO yakni, *collective defence*, crisis management, dan *Cooperative Security* sangat bergantung pada kemampuan NATO dalam mengamankan dan menyediakan sistem informasi dan komunikasi yang kuat dan aman dalam mendukung segala pelaksanaan misi dan operasi NATO.

Sebagai penegasan kembali komitmen NATO dalam menanggapi ancaman kejahatan siber secara serius, NATO membuat sebuah kesepakatan yang berjudul *Cyber Defence Pledge*. Secara garis besar *Cyber Defence Pledge* merupakan pedoman bagi NATO dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan pertahanan siber mereka sebagai salah satu komponen dari *collective defence* NATO.

#### **4.3.1 Kerjasama NATO dengan Organisasi Internasional dalam Pertahanan Siber**

Kekhawatiran mengenai ancaman kejahatan siber telah menjadi isu internasional yang menjadi perhatian berbagai organisasi internasional. PBB telah merundingkan seperangkat prinsip dan norma yang harus dipatuhi oleh negara-

negara anggotanya pada dunia siber melalui sebuah epistemic community yang terdiri dari kumpulan para ahli dari berbagai negara.

*Organization for Security and Co-operation in Europe* telah mengadopsi perangkat pedoman pertahanan siber kedua mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan saling kepercayaan dan transparansi antar negara dan mengajak negara lain yang tertarik untuk mengikut kerjasama tersebut (NATO, 2017).

NATO menandatangani *Technical Arrangement On Cyber Defence Cooperation* dengan Uni Eropa pada tahun 2016. Menghadapi tantangan dan ancaman yang sama, NATO dan Uni Eropa, melalui perjanjian tersebut, akan memperkuat kerjasama mereka pada pertahanan siber, utamanya pada aspek pertukaran informasi, pelatihan, penelitian dan uji coba. Kerjasama tersebut akan melibatkan *NATO's Computer Incident Response Capability* (NCIRC) dan the *Computer Emergency Response Team of the European Union* (CERT-EU). Perwakilan Uni Eropa juga akan bergabung dengan NATO pada pertemuan ahli pertahanan siber nasional pada *Cyber Coalition Exercise* di Estonia (NATO, 2017).

Setiap tahunnya, NATO melalui *NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence* (CCDCOE) melaksanakan *Cyber Security Conference*. *Cyber Security Conference* ini dimulai pada tahun 2012 dan terus berjalan hingga tahun 2017. Cycon yang dilaksanakan di Taillin, Estonia tersebut, membawa isu dan tema spesifik yang berbeda-beda dari tahun ke tahun sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh NATO (CCDCOE, 2012).

Dari segala operasi dan misi yang dijalankan oleh NATO dalam mengantisipasi kejahatan siber dapat mengancam dan membahayakan negara anggotanya, dapat dipahami bahwa kepentingan yang diupayakan NATO adalah untuk melindungi negara-negara anggotanya.

Penguatan kemampuan dan teknologi sistem informasi dan komunikasi di tubuh NATO dapat diartikan sebagai bentuk baru dari *collective defence* di ranah dunia maya. Sistem komunikasi dan informasi merupakan sektor vital yang dimiliki NATO. Sektor ini pula yang menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan dan eksekusi dari setiap operasi misi NATO. Sehingga tidak heran jika NATO menempatkan *Cyber Defence* sebagai hal yang cukup serius.

Juga dapat terbaca dari upaya NATO untuk menggandeng Uni Eropa dalam hal *Technical Arrangement On Cyber Defence Cooperation*, agar penyebaran dan pembagian informasi mengenai ancaman siber ini dapat saling melengkapi melalui kerjasama antara dua organisasi internasional. Kerjasama ini pula menjadi salah satu wujud dari *Cooperative Security* dan *Partnership through Cooperation* yang tertuang dalam Konsep Strategis baru NATO. Hingga saat ini, belum terdapat berita, laporan ataupun kejadian yang mengatakan bahwa NATO mengalami serangan dan kebocoran data pada sistem informasi dan komunikasinya. Hal ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa upaya *Cyber Defence* NATO cukup efektif, dan akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Perubahan postur keamanan internasional pasca Perang Dingin membuat NATO harus melakukan transformasi organisasi agar mampu menjaga relevansi eksistensinya agar mampu menghadapi ancaman-ancaman baru. Oleh karena itu disusunlah The 2010 New Strategic Concept NATO pada *Lisbon Summit 2010* yang memperluas cakupan kerja NATO pada tiga hal utama yakni, *crisis-management*, *collective defence and deterrence*, dan *Cooperative Security*. Konsep strategis baru ini mempengaruhi operasi-operasi yang diambil NATO pasca tahun 2010, seperti pada bidang terorisme, keamanan maritim, dan keamanan siber.

Pada bidang terorisme, NATO memperbarui pedoman penanganan terorisme mereka melalui NATO's *policy guideline on counter-terrorism* yang berfokus untuk meningkatkan *awareness*, *capabilities*, dan *engagement* terhadap ancaman terorisme. Selain itu, pada Warsaw Summit tahun 2012 NATO memberikan bantuan kepada Global Coalition Counter ISIL berupa NATO AWACS, sebuah teknologi pengawasan dan pengamatan terhadap aktifitas-aktifitas terorisme milik NATO. Sebagai tambahan, NATO juga memperkuat hubungan dengan Jordania dalam hal penguatan keamanan siber diantara kedua pihak, dan pelatihan terhadap angkatan militer Irak.

Di bidang penanganan ancaman pembajakan di laut NATO membentuk *the Alliance Maritime Strategy* yang berisikan empat pedoman dalam menjalankan keamanan di lingkungan maritim yakni, *deterrence and collective defence*, *crisis management*, *maritime security*, dan *Cooperative Security: Outreach through Partnerships, Dialogue and Cooperation*. Pada Juli 2016 juga telah diluncurkan sebuah operasi kemaritiman yang bernama *Operation Sea Guardian* yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim yang bisa saja menjadi ancaman bagi teritori NATO dan negara-negara anggota NATO. *Operation Sea Guardian* memiliki tujuh fungsi yakni, *Support maritime situational awareness*, *Uphold freedom of navigation*, *Conduct maritime interdiction*, *Fight the proliferation of weapons of mass destruction*, *Protect critical infrastructure*, *Support maritime counter-terrorism*, *Contribute to maritime security capacity-building*.

Dan bidang terakhir, NATO dalam menangani ancaman kejahatan siber mengarahkan NATO pada dua prioritas utama, yakni penguatan dan peningkatan kemampuan perlindungan fasilitas dan teknologi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki NATO. Prioritas kedua ialah memberikan bantuan kepada negara-negara anggota dalam mengembangkan sendiri kemampuan pertahanan sibernya. Untuk memperkuat komitmennya, pada Juli 2016 NATO mengeluarkan *Cyber Defence Pledge* sebagai penegasan sikap dan pedoman peningkatan kemampuan pertahanan siber NATO. NATO merangkul EU sebagai rekan kerjasamanya dalam pertahanan siber, ditandai dengan penandatanganan *Technical Arrangements on Cyber Defence* pada Juli 2016.

Implementasi The 2010 New Strategic Concept NATO telah menjadi katalisator bagi NATO untuk memperhatikan lebih serius ancaman-ancaman non-tradisional dan membuat NATO lebih sering menjalin kerjasama dengan negara-negara non-NATO dan organisasi internasional dalam operasinya.

## **5.2 Saran**

NATO sebagai organisasi pakta pertahanan harus tetap menjalankan aktifitas-aktifitasnya sesuai dengan hal-hal yang dimandatkan Piagam NATO serta memperhatikan The 2010 New Strategic Concept NATO sebagai pedoman organisasi untuk satu dekade kedepan. Tak lupa, NATO harus memperhatikan hukum internasional yang berlaku ketika menjalankan misi-misi operasinya, mengingat hampir keseluruhan kegiatan NATO dijalankan pada tingkat transnasional. NATO harus tetap berkontribusi, dengan kemampuan yang mereka miliki (baik militer maupun non-militer) terhadap upaya-upaya menciptakan perdamaian dunia.

NATO sebaiknya merangkul negara-negara yang tidak dulunya merupakan kompetitor mereka pada masa Perang Dingin, untuk dijadikan rekan kerja saat ini. Hal ini akan menunjukkan i'tikad baik dari negara-negara NATO dalam menjaga stabilitas kondisi keamanan dunia.

## Daftar Pustaka

- Agung, A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Alekovski, S., Bakreski, O., & Avramoska, B. (2014, December). Collective Security , The Role of International Organizations, and Implications in International Security Order. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5, 274-282.
- Alessi, C., & Hansson, S. (2016, December 30). *Combating Maritime Piracy*. Diambil kembali dari Council on Foreign Relations: <http://www.cfr.org/piracy/combating-maritime-piracy/p18376>
- American Heritage Dictionary. (2016, December 30). *Terrorism*. Diambil kembali dari American Heritage Dictionary: <https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=terrorism>
- Asmuss, R. D. (2002). *Opening NATO's Door*. New York: Columbi Universtiy Press.
- Baylis, J., & Smith, S. (2005). *The Globalisation of the World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Bellamy, A. J. (2005). Is the War on Terror Just? *International Relations*, XIX, 275-296.
- CCDCOE. (2012, June 8). *Cyber Security Conference*. Diambil kembali dari NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence: <https://ccdcoe.org/cycon-2012.html>
- Chalk, P. (2000). *Non Military Security and Global Order*. Oxford: Oxford University Press.
- Claude, I. (1961). The Management of Power in the Changing United Nations. *International Organization*, 15, 219-221.
- Dennis, M. A. (2016, December 30). *Cybercrime*. Diambil kembali dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/cybercrime>
- European Parliament. (2016, December 30). *Understanding Definitions of Terrorism*. Diambil kembali dari European Parliament: [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/.../EPRS\\_ATA\(2015\)571\\_320\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/.../EPRS_ATA(2015)571_320_EN.pdf)
- FBI. (2016, December 30). *Terrorism*. Diambil kembali dari FBI: <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism>

- Gordon, P. H. (1997). *NATO's Transformation, the Changing shape of the Atlantic Alliance*. London: Rowman & Littlefield Publisher.
- Henderson, C. W. (1997). *The International Relations: Conflict and Cooperation at the Turn of 21st Century*. New York: McGraw-Hill International.
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- International Maritime Organization (IMO). (2017, Februari 15). *Piracy and armed robbery against ships*. Dipetik Februari 15, 2017, dari International Maritime Organization (IMO): <http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx>
- Keohane, R., & Martin. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, XX(1), 39-51.
- Lamy, S. L. (2001). *Contemporary Mainstream Approaches: Neorealism and Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Morgenthau, H. J. (1985). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New Delhi: Kalyani Publisher.
- Munich Re. (2006). *Piracy - Threat at Sea*. Munich: Munich Re.
- NATO. (2001). *NATO Handbook: Partnership and Cooperation*. Brussel: NATO Office of Information and Press.
- NATO. (2006). *NATO Handbook*. Brussel: Public Diplomacy Division NATO. Diambil kembali dari NATO.
- NATO. (2012, Mei 21). *NATO's policy guidelines on counter-terrorism*. Diambil kembali dari NATO: [http://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_87905.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87905.htm)
- NATO. (2014, November 11)a. *Defence Planning Group*. Diambil kembali dari NATO: [http://nato.int/cps/en/natolive/topics\\_49201.htm](http://nato.int/cps/en/natolive/topics_49201.htm)
- NATO. (2014, Juli 15)b. *Military Organization and Structure*. Diambil kembali dari NATO: [http://nato.int/cps/en/natolive/topics\\_49608.htm](http://nato.int/cps/en/natolive/topics_49608.htm)
- NATO. (2015, April 25). *What is NATO?* Diambil kembali dari NATO: [http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_82686.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82686.htm)
- NATO. (2016, November 2)a. *A short history of NATO*. Diambil kembali dari NATO: <https://www.nato.int/history/nato-history.html>
- NATO. (2016, March 16)b. *Member Countries*. Diambil kembali dari NATO: [http://nato.int/cps/en/natolive/topics\\_52044.htm](http://nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm)

- NATO. (2016, April 7)c. *Nuclear Planning Group*. Diambil kembali dari NATO: [http://nato.int/cps/en/natolive/topics\\_50069.htm](http://nato.int/cps/en/natolive/topics_50069.htm)
- NATO. (2016, Oktober 27)d. *Operation Sea Guardian*. Diambil kembali dari NATO: [http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_136233.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136233.htm)
- NATO. (2016, March 16 )e. *Organization*. Diambil kembali dari NATO: <http://nato.int/cps/en/natolive/organization.htm>
- NATO. (2017, January 17)a. *Cyber Defence*. Diambil kembali dari NATO: [http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_78170.htm#](http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm#)
- NATO. (2017, Februari 6)b. *NATO*. Diambil kembali dari Countering Terrorism: [http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_77646.htm](http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm)
- NATO. (2017, February 13)c. *NATO: changing gear on cyber defence*. Diambil kembali dari NATO: <http://www.nato.int/docu/Review/2016/Also-in-2016/cyber-defense-nato-security-role/EN/index.htm>
- Organski, A. (1960). *World Politics*. New York: Alfred A. Knopf.
- Snyder, C. (1999). *Contemporary Security and Strategy*. New York: MacMillan Press.
- Terrorism Research. (2005, May 27). *What is Terrorism?* Dipetik February 14, 2017, dari International Terrorism and Security Research: <http://www.terrorism-research.com>
- U.S Department of Justice. (2016, November 21). *Cyber Security Unit*. Dipetik February 15, 2017, dari U.S. Department of Justice: <https://www.justice.gov/criminal-ccips/cybersecurity-unit>
- UNDP. (2007). *“CyberCrime”*. Marocco: UNDP Publication.
- United States Institute for Peace. (2016, December 30). *International Terrorism: Definitions, Causes, and Responses*. Diambil kembali dari United States Institute for Peace: <https://www.usip.org/sites/default/files/terrorism.pdf>
- UNSC. (2004, October 8). *UN Security Council Resolution 1566, Terrorism*. Diambil kembali dari Council on Foreign Relations: <http://i.cfr.org/content/publications/attachments/SC1566.pdf>
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Relations*. Reading: Addison-Wesley.
- Wilkinson, P. (1977). *Terrorism and Liberal State*. New York: The Macmillan Press Ltd.
- Yost, D. S. (1977). *NATO Transformed: The Alliance's New Roles in International Security*. London: Leicester University Press.

## **The 2010 Strategic Concept NATO**

### **Preface**

We, the Heads of State and Government of the NATO nations, are determined that NATO will continue to play its unique and essential role in ensuring our common defence and security. This Strategic Concept will guide the next phase in NATO's evolution, so that it continues to be effective in a changing world, against new threats, with new capabilities and new partners:

- It reconfirms the bond between our nations to defend one another against attack, including against new threats to the safety of our citizens.
- It commits the Alliance to prevent crises, manage conflicts and stabilize post-conflict situations, including by working more closely with our international partners, most importantly the United Nations and the European Union.
- It offers our partners around the globe more political engagement with the Alliance, and a substantial role in shaping the NATO-led operations to which they contribute.
- It commits NATO to the goal of creating the conditions for a world without nuclear weapons – but reconfirms that, as long as there are nuclear weapons in the world, NATO will remain a nuclear Alliance.
- It restates our firm commitment to keep the door to NATO open to all European democracies that meet the standards of membership, because enlargement contributes to our goal of a Europe whole, free and at peace.
- It commits NATO to continuous reform towards a more effective, efficient and flexible Alliance, so that our taxpayers get the most security for the money they invest in defence.

The citizens of our countries rely on NATO to defend Allied nations, to deploy robust military forces where and when required for our security, and to help promote common security with our partners around the globe. While the world is changing, NATO's essential mission will remain the same: to ensure that the Alliance remains an unparalleled community of freedom, peace, security and shared values.

### **Core Tasks and Principles**

1. NATO's fundamental and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its members by political and military means. Today, the Alliance remains an essential source of stability in an unpredictable world.
2. NATO member states form a unique community of values, committed to the principles of individual liberty, democracy, human rights and the rule of law. The Alliance is firmly committed to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and to the Washington Treaty, which affirms the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security.
3. The political and military bonds between Europe and North America have been forged in NATO since the Alliance was founded in 1949; the transatlantic link remains as strong, and as important to the preservation of Euro-Atlantic peace and security, as ever. The security of NATO members on both sides of the Atlantic is indivisible. We will continue to defend it together, on the basis of solidarity, shared purpose and fair burden-sharing.
4. The modern security environment contains a broad and evolving set of challenges to the security of NATO's territory and populations. In order to assure their security, the Alliance must and will continue fulfilling effectively three essential core tasks, all of which contribute to safeguarding Alliance members, and always in accordance with international law:
  - 1) Collective defence. NATO members will always assist each other against attack, in accordance with Article 5 of the Washington Treaty.



That commitment remains firm and binding. NATO will deter and defend against any threat of aggression, and against emerging security challenges where they threaten the fundamental security of individual Allies or the Alliance as a whole.

- 2) Crisis management. NATO has a unique and robust set of political and military capabilities to address the full spectrum of crises – before, during and after conflicts. NATO will actively employ an appropriate mix of those political and military tools to help manage developing crises that have the potential to affect Alliance security, before they escalate into conflicts; to stop ongoing conflicts where they affect Alliance security; and to help consolidate stability in post-conflict situations where that contributes to Euro-Atlantic security.
- 3) Cooperative security. The Alliance is affected by, and can affect, political and security developments beyond its borders. The Alliance will engage actively to enhance international security, through partnership with relevant countries and other international organisations; by contributing actively to arms control, non-proliferation and disarmament; and by keeping the door to membership in the Alliance open to all European democracies that meet NATO's standards.
5. NATO remains the unique and essential transatlantic forum for consultations on all matters that affect the territorial integrity, political independence and security of its members, as set out in Article 4 of the Washington Treaty. Any security issue of interest to any Ally can be brought to the NATO table, to share information, exchange views and, where appropriate, forge common approaches.
6. In order to carry out the full range of NATO missions as effectively and efficiently as possible, Allies will engage in a continuous process of reform, modernisation and transformation.

## **The Security Environment**

7. Today, the Euro-Atlantic area is at peace and the threat of a conventional attack against NATO territory is low. That is an historic success for the policies of robust defence, Euro-Atlantic integration and active partnership that have guided NATO for more than half a century.
8. However, the conventional threat cannot be ignored. Many regions and countries around the world are witnessing the acquisition of substantial, modern military capabilities with consequences for international stability and Euro-Atlantic security that are difficult to predict. This includes the proliferation of ballistic missiles, which poses a real and growing threat to the Euro-Atlantic area.
9. The proliferation of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, and their means of delivery, threatens incalculable consequences for global stability and prosperity. During the next decade, proliferation will be most acute in some of the world's most volatile regions.
10. Terrorism poses a direct threat to the security of the citizens of NATO countries, and to international stability and prosperity more broadly. Extremist groups continue to spread to, and in, areas of strategic importance to the Alliance, and modern technology increases the threat and potential impact of terrorist attacks, in particular if terrorists were to acquire nuclear, chemical, biological or radiological capabilities.
11. Instability or conflict beyond NATO borders can directly threaten Alliance security, including by fostering extremism, terrorism, and trans-national illegal activities such as trafficking in arms, narcotics and people.
12. Cyber attacks are becoming more frequent, more organised and more costly in the damage that they inflict on government administrations, businesses, economies and potentially also transportation and supply networks and other critical infrastructure; they can reach a threshold that threatens national and Euro-Atlantic prosperity, security and stability.

Foreign militaries and intelligence services, organised criminals, terrorist and/or extremist groups can each be the source of such attacks.

13. All countries are increasingly reliant on the vital communication, transport and transit routes on which international trade, energy security and prosperity depend. They require greater international efforts to ensure their resilience against attack or disruption. Some NATO countries will become more dependent on foreign energy suppliers and in some cases, on foreign energy supply and distribution networks for their energy needs. As a larger share of world consumption is transported across the globe, energy supplies are increasingly exposed to disruption.
14. A number of significant technology-related trends – including the development of laser weapons, electronic warfare and technologies that impede access to space – appear poised to have major global effects that will impact on NATO military planning and operations.
15. Key environmental and resource constraints, including health risks, climate change, water scarcity and increasing energy needs will further shape the future security environment in areas of concern to NATO and have the potential to significantly affect NATO planning and operations.

### **Defence and Deterrence**

16. The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our territory and our populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington Treaty. The Alliance does not consider any country to be its adversary. However, no one should doubt NATO's resolve if the security of any of its members were to be threatened.
17. Deterrence, based on an appropriate mix of nuclear and conventional capabilities, remains a core element of our overall strategy. The circumstances in which any use of nuclear weapons might have to be contemplated are extremely remote. As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance.

18. The supreme guarantee of the security of the Allies is provided by the strategic nuclear forces of the Alliance, particularly those of the United States; the independent strategic nuclear forces of the United Kingdom and France, which have a deterrent role of their own, contribute to the overall deterrence and security of the Allies.
19. We will ensure that NATO has the full range of capabilities necessary to deter and defend against any threat to the safety and security of our populations. Therefore, we will:
- maintain an appropriate mix of nuclear and conventional forces;
  - maintain the ability to sustain concurrent major joint operations and several smaller operations for collective defence and crisis response, including at strategic distance;
  - develop and maintain robust, mobile and deployable conventional forces to carry out both our Article 5 responsibilities and the Alliance's expeditionary operations, including with the NATO Response Force;
  - carry out the necessary training, exercises, contingency planning and information exchange for assuring our defence against the full range of conventional and emerging security challenges, and provide appropriate visible assurance and reinforcement for all Allies;
  - ensure the broadest possible participation of Allies in collective defence planning on nuclear roles, in peacetime basing of nuclear forces, and in command, control and consultation arrangements;
  - develop the capability to defend our populations and territories against ballistic missile attack as a core element of our collective defence, which contributes to the indivisible security of the Alliance. We will actively seek cooperation on missile defence with Russia and other Euro-Atlantic partners;
  - further develop NATO's capacity to defend against the threat of chemical, biological, radiological and nuclear weapons of mass destruction;
  - develop further our ability to prevent, detect, defend against and recover from cyber-attacks, including by using the NATO planning process to

enhance and coordinate national cyber-defence capabilities, bringing all NATO bodies under centralized cyber protection, and better integrating NATO cyber awareness, warning and response with member nations;

- enhance the capacity to detect and defend against international terrorism, including through enhanced analysis of the threat, more consultations with our partners, and the development of appropriate military capabilities, including to help train local forces to fight terrorism themselves;
- develop the capacity to contribute to energy security, including protection of critical energy infrastructure and transit areas and lines, cooperation with partners, and consultations among Allies on the basis of strategic assessments and contingency planning;
- ensure that the Alliance is at the front edge in assessing the security impact of emerging technologies, and that military planning takes the potential threats into account;
- sustain the necessary levels of defence spending, so that our armed forces are sufficiently resourced;
- continue to review NATO's overall posture in deterring and defending against the full range of threats to the Alliance, taking into account changes to the evolving international security environment.

### **Security through Crisis Management**

20. Crises and conflicts beyond NATO's borders can pose a direct threat to the security of Alliance territory and populations. NATO will therefore engage, where possible and when necessary, to prevent crises, manage crises, stabilize post-conflict situations and support reconstruction.
21. The lessons learned from NATO operations, in particular in Afghanistan and the Western Balkans, make it clear that a comprehensive political, civilian and military approach is necessary for effective crisis management. The Alliance will engage actively with other international actors before, during and after crises to encourage collaborative analysis,

planning and conduct of activities on the ground, in order to maximise coherence and effectiveness of the overall international effort.

22. The best way to manage conflicts is to prevent them from happening. NATO will continually monitor and analyse the international environment to anticipate crises and, where appropriate, take active steps to prevent them from becoming larger conflicts.
23. Where conflict prevention proves unsuccessful, NATO will be prepared and capable to manage ongoing hostilities. NATO has unique conflict management capacities, including the unparalleled capability to deploy and sustain robust military forces in the field. NATO-led operations have demonstrated the indispensable contribution the Alliance can make to international conflict management efforts.
24. Even when conflict comes to an end, the international community must often provide continued support, to create the conditions for lasting stability. NATO will be prepared and capable to contribute to stabilisation and reconstruction, in close cooperation and consultation wherever possible with other relevant international actors.
25. To be effective across the crisis management spectrum, we will:
  - enhance intelligence sharing within NATO, to better predict when crises might occur, and how they can best be prevented;
  - further develop doctrine and military capabilities for expeditionary operations, including counterinsurgency, stabilization and reconstruction operations;
  - form an appropriate but modest civilian crisis management capability to interface more effectively with civilian partners, building on the lessons learned from NATO-led operations. This capability may also be used to plan, employ and coordinate civilian activities until conditions allow for the transfer of those responsibilities and tasks to other actors;
  - enhance integrated civilian-military planning throughout the crisis spectrum,

- develop the capability to train and develop local forces in crisis zones, so that local authorities are able, as quickly as possible, to maintain security without international assistance;
- identify and train civilian specialists from member states, made available for rapid deployment by Allies for selected missions, able to work alongside our military personnel and civilian specialists from partner countries and institutions;
- broaden and intensify the political consultations among Allies, and with partners, both on a regular basis and in dealing with all stages of a crisis – before, during and after.

## **Promoting International Security through Cooperation**

### **Arms Control, Disarmament, and Non-Proliferation**

26. NATO seeks its security at the lowest possible level of forces. Arms control, disarmament and non-proliferation contribute to peace, security and stability, and should ensure undiminished security for all Alliance members. We will continue to play our part in reinforcing arms control and in promoting disarmament of both conventional weapons and weapons of mass destruction, as well as non-proliferation efforts:

- We are resolved to seek a safer world for all and to create the conditions for a world without nuclear weapons in accordance with the goals of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, in a way that promotes international stability, and is based on the principle of undiminished security for all.
- With the changes in the security environment since the end of the Cold War, we have dramatically reduced the number of nuclear weapons stationed in Europe and our reliance on nuclear weapons in NATO strategy. We will seek to create the conditions for further reductions in the future.
- In any future reductions, our aim should be to seek Russian agreement to increase transparency on its nuclear weapons in Europe and relocate

these weapons away from the territory of NATO members. Any further steps must take into account the disparity with the greater Russian stockpiles of short-range nuclear weapons.

- We are committed to conventional arms control, which provides predictability, transparency and a means to keep armaments at the lowest possible level for stability. We will work to strengthen the conventional arms control regime in Europe on the basis of reciprocity, transparency and host-nation consent.
- We will explore ways for our political means and military capabilities to contribute to international efforts to fight proliferation.
- National decisions regarding arms control and disarmament may have an impact on the security of all Alliance members. We are committed to maintain, and develop as necessary, appropriate consultations among Allies on these issues.

### **Open Door**

27. NATO's enlargement has contributed substantially to the security of Allies; the prospect of further enlargement and the spirit of cooperative security have advanced stability in Europe more broadly. Our goal of a Europe whole and free, and sharing common values, would be best served by the eventual integration of all European countries that so desire into Euro-Atlantic structures.

- The door to NATO membership remains fully open to all European democracies which share the values of our Alliance, which are willing and able to assume the responsibilities and obligations of membership, and whose inclusion can contribute to common security and stability.

### **Partnerships**

28. The promotion of Euro-Atlantic security is best assured through a wide network of partner relationships with countries and organisations around



the globe. These partnerships make a concrete and valued contribution to the success of NATO's fundamental tasks.

29. Dialogue and cooperation with partners can make a concrete contribution to enhancing international security, to defending the values on which our Alliance is based, to NATO's operations, and to preparing interested nations for membership of NATO. These relationships will be based on reciprocity, mutual benefit and mutual respect.
30. We will enhance our partnerships through flexible formats that bring NATO and partners together – across and beyond existing frameworks:
  - We are prepared to develop political dialogue and practical cooperation with any nations and relevant organisations across the globe that share our interest in peaceful international relations.
  - We will be open to consultation with any partner country on security issues of common concern.
  - We will give our operational partners a structural role in shaping strategy and decisions on NATO-led missions to which they contribute.
  - We will further develop our existing partnerships while preserving their specificity.
31. Cooperation between NATO and the United Nations continues to make a substantial contribution to security in operations around the world. The Alliance aims to deepen political dialogue and practical cooperation with the UN, as set out in the UN-NATO Declaration signed in 2008, including through:
  - enhanced liaison between the two Headquarters;
  - more regular political consultation; and
  - enhanced practical cooperation in managing crises where both organisations are engaged.
32. An active and effective European Union contributes to the overall security of the Euro-Atlantic area. Therefore the EU is a unique and essential partner for NATO. The two organisations share a majority of members,

and all members of both organisations share common values. NATO recognizes the importance of a stronger and more capable European defence. We welcome the entry into force of the Lisbon Treaty, which provides a framework for strengthening the EU's capacities to address common security challenges. Non-EU Allies make a significant contribution to these efforts. For the strategic partnership between NATO and the EU, their fullest involvement in these efforts is essential. NATO and the EU can and should play complementary and mutually reinforcing roles in supporting international peace and security. We are determined to make our contribution to create more favourable circumstances through which we will:

- fully strengthen the strategic partnership with the EU, in the spirit of full mutual openness, transparency, complementarity and respect for the autonomy and institutional integrity of both organisations;
  - enhance our practical cooperation in operations throughout the crisis spectrum, from coordinated planning to mutual support in the field;
  - broaden our political consultations to include all issues of common concern, in order to share assessments and perspectives;
  - cooperate more fully in capability development, to minimise duplication and maximise cost-effectiveness.
33. NATO-Russia cooperation is of strategic importance as it contributes to creating a common space of peace, stability and security. NATO poses no threat to Russia. On the contrary: we want to see a true strategic partnership between NATO and Russia, and we will act accordingly, with the expectation of reciprocity from Russia.
34. The NATO-Russia relationship is based upon the goals, principles and commitments of the NATO-Russia Founding Act and the Rome Declaration, especially regarding the respect of democratic principles and the sovereignty, independence and territorial integrity of all states in the Euro-Atlantic area. Notwithstanding differences on particular issues, we remain convinced that the security of NATO and Russia is intertwined and

that a strong and constructive partnership based on mutual confidence, transparency and predictability can best serve our security. We are determined to:

- enhance the political consultations and practical cooperation with Russia in areas of shared interests, including missile defence, counter-terrorism, counter-narcotics, counter-piracy and the promotion of wider international security;
- use the full potential of the NATO-Russia Council for dialogue and joint action with Russia.

35. The Euro-Atlantic Partnership Council and Partnership for Peace are central to our vision of Europe whole, free and in peace. We are firmly committed to the development of friendly and cooperative relations with all countries of the Mediterranean, and we intend to further develop the Mediterranean Dialogue in the coming years. We attach great importance to peace and stability in the Gulf region, and we intend to strengthen our cooperation in the Istanbul Cooperation Initiative. We will aim to:

- enhance consultations and practical military cooperation with our partners in the Euro-Atlantic Partnership Council;
- continue and develop the partnerships with Ukraine and Georgia within the NATO-Ukraine and NATO-Georgia Commissions, based on the NATO decision at the Bucharest summit 2008, and taking into account the Euro-Atlantic orientation or aspiration of each of the countries;
- facilitate the Euro-Atlantic integration of the Western Balkans, with the aim to ensure lasting peace and stability based on democratic values, regional cooperation and good neighbourly relations;
- deepen the cooperation with current members of the Mediterranean Dialogue and be open to the inclusion in the Mediterranean Dialogue of other countries of the region;

- develop a deeper security partnership with our Gulf partners and remain ready to welcome new partners in the Istanbul Cooperation Initiative.

## **Reform and Transformation**

36. Unique in history, NATO is a security Alliance that fields military forces able to operate together in any environment; that can control operations anywhere through its integrated military command structure; and that has at its disposal core capabilities that few Allies could afford individually.

37. NATO must have sufficient resources – financial, military and human – to carry out its missions, which are essential to the security of Alliance populations and territory. Those resources must, however, be used in the most efficient and effective way possible. We will:

- maximise the deployability of our forces, and their capacity to sustain operations in the field, including by undertaking focused efforts to meet NATO's usability targets;
- ensure the maximum coherence in defence planning, to reduce unnecessary duplication, and to focus our capability development on modern requirements;
- develop and operate capabilities jointly, for reasons of cost-effectiveness and as a manifestation of solidarity;
- preserve and strengthen the common capabilities, standards, structures and funding that bind us together;
- engage in a process of continual reform, to streamline structures, improve working methods and maximise efficiency.

## **An Alliance for the 21st Century**

38. We, the political leaders of NATO, are determined to continue renewal of our Alliance so that it is fit for purpose in addressing the 21st Century security challenges. We are firmly committed to preserve its effectiveness as the globe's most successful political-military Alliance. Our Alliance

thrives as a source of hope because it is based on common values of individual liberty, democracy, human rights and the rule of law, and because our common essential and enduring purpose is to safeguard the freedom and security of its members. These values and objectives are universal and perpetual, and we are determined to defend them through unity, solidarity, strength and resolve.

## **NATO's policy guidelines on counter-terrorism**

### **I. Introduction**

1. Terrorism poses a direct threat to the security of the citizens of NATO countries, and to international stability and prosperity more broadly and will remain a threat for the foreseeable future. Terrorists have demonstrated their ability to cross international borders, establish cells, reconnoitre targets and execute attacks. The threat is exacerbated by terrorist groups and individuals that continue to spread to, and in, areas of strategic importance to the Alliance, including Allies' own territory. Modern technology increases the potential impact of terrorist attacks employing conventional and unconventional means, particularly as terrorists seek to acquire chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) capabilities and cyber abilities. Instability or conflict can create an environment conducive to the spread of terrorism, including by fostering extremist ideologies, intolerance and fundamentalism.
2. NATO's response to terrorism has been largely shaped by the terrorist attacks of 11 September 2001, which prompted Allies to launch Operation Active Endeavour, to adopt the Military Concept for Defence against Terrorism (MC472) and to initiate various capability and institutional changes. In the past decade, NATO has made considerable progress in areas of importance to the Alliance such as operations, enhanced intelligence exchange and the development of technology solutions through the Defence against Terrorism Programme of Work and the Science for Peace and Security Programme.
3. Through the Alliance Strategic Concept, Allies reaffirmed that the Alliance must "deter and defend against emerging security challenges where they threaten the fundamental security of individual Allies or the Alliance as a whole". Allies have, therefore, decided to review NATO's approach to counter-terrorism and to enhance both the political and the military aspects of NATO's contribution to national and international efforts.

4. Allies will do so by capitalising on NATO's distinct cross-cutting strengths and by identifying the Alliance's value-added contribution to the broad, UN-led international effort to combat terrorism. In defining NATO's overarching approach to terrorism, Allies recognise that most counter terrorism tools remain primarily with national civilian and judicial authorities. Allies acknowledge that other International Organisations have mandates and capabilities that could enhance Allies' efforts to counter terrorism. NATO will place particular emphasis on preventing terrorist attacks and enhancing resilience through contributing to national and international efforts while avoiding unnecessary duplication and respecting the principles of complementarity. Clear direction, enhanced coordination and greater consistency of efforts and activities will enable NATO to use its resources more effectively.

## **II. Aim**

5. The aim of these policy guidelines is to:
- Provide strategic and risk-informed direction to the counter-terrorism activities ongoing across the Alliance as part of NATO's core tasks of collective defence, crisis management and cooperative security.
  - Identify the principles to which the Alliance adheres.
  - Identify key areas in which the Alliance will undertake initiatives to enhance the prevention of and resilience to acts of terrorism with a focus on improved awareness of the threat, adequate capabilities to address it and engagement with partner countries and other international actors<sup>1</sup>.

Following the adoption of these Policy Guidelines, an Action Plan for Implementation will be developed.

### III. Principles

6. **Compliance with International Law:** NATO will continue to act in accordance with international law, the principles of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights. The UN Global Counter-Terrorism Strategy, International Conventions and Protocols against terrorism and relevant UN Resolutions provide the framework for all national and multilateral efforts to combat terrorism, including those conducted by the Alliance.
7. **NATO's Support to Allies:** Individual NATO members have primary responsibility for the protection of their populations and territories against terrorism. Cooperation through NATO can enhance Allies' efforts to prevent, mitigate, respond to, and recover from acts of terrorism. NATO, upon request, may support these efforts.
8. **Non-Duplication and Complementarity:** NATO will promote complementarity with and avoid unnecessary duplication of existing efforts by individual nations or other International Organisations. NATO will seek to coordinate and leverage its expertise and resources and will focus on targeted programmes where it can contribute to and/or reinforce the actions of Allied nations and other international actors, as appropriate.

### IV. Key Areas

9. NATO, as an international organisation, has unique assets and capabilities that can support Allied efforts in the fight against terrorism. As set out in the aim of these Policy Guidelines, NATO will contribute more effectively to the prevention of terrorism and increase resilience to acts of terrorism. To this end, the Alliance will coordinate and consolidate its counter-terrorism efforts and focus on three main areas, awareness, capabilities and engagement.
10. Awareness: NATO will ensure shared awareness of the terrorist threat and vulnerabilities among Allies through consultations, enhanced sharing of intelligence, continuous strategic analysis and assessments in support of



national authorities. This will enable Allies and the Alliance to prepare effectively and to take possible mitigating action in the prevention of and response to terrorist attacks. NATO will also promote common understanding of its counter-terrorism role as part of a broader international effort through engagement and strategic communications.

11. Capabilities: NATO has acquired much valuable expertise in countering asymmetric threats and in responding to terrorism. NATO's work on airspace security, air defence, maritime security, response to CBRN, non-proliferation of Weapons of Mass Destruction and protection of critical infrastructure is well established. The Alliance will strive to ensure that it has adequate capabilities to prevent, protect against and respond to terrorist threats, based on the level of ambition as defined in the Political Guidance<sup>2</sup>. It will do so by considering capability developments, innovative technologies and methods that address asymmetric threats in a more comprehensive and informed way, including through the Defence Against Terrorism Programme of Work. NATO will also strive to maintain its operational capacity and capitalise on the lessons learned in operations, including experience gained through Special Operations Forces. Training, education and exercises based on different threat scenarios will continue to improve interoperability by assimilating lessons learned and best practices. These capabilities may also be offered to Allies in support of civil emergency planning and the protection of critical infrastructure, particularly as it may relate to counter-terrorism, as requested.

12. Engagement: The challenge of terrorism requires a holistic approach by the international community, involving a wide range of instruments. To enhance Allies' security, NATO will continue to engage with partner countries and other international actors in countering terrorism. The Alliance will strengthen its outreach to and cooperation with partner countries as well as international and regional organisations, in particular the UN, EU and OSCE, in accordance with the Comprehensive Approach

Action Plan, to promote common understanding of the terrorist threat and to leverage the full potential of each stake-holder engaged in the global counter terrorism effort. NATO will enhance consultations and ensure a more systematic approach to practical cooperation with partner countries<sup>3</sup> using existing mechanisms, including scientific cooperation on technological innovation for improved security<sup>4</sup>. Particular emphasis will be placed on raising awareness, capacity building, civil-emergency planning and crisis management in order to respond to specific needs of partner countries and Allied interests. This will advance partners' preparedness and protection as well as their identification of vulnerabilities and gaps and help partner countries to fight terrorism more effectively themselves. Counter-terrorism training, education and support for capacity-building will be consistent with the objectives and priorities of NATO's policy on partnerships.

## **V. NATO's Response**

13. The North Atlantic Council will guide NATO's counter-terrorism efforts and implementation of these Policy Guidelines. The Terrorism Task Force will report on an annual basis on the implementation of these Policy Guidelines.
14. NATO will maintain flexibility as to how to counter terrorism, playing a leading or supporting role as required. Allies' capabilities represent an essential component of a potential response to terrorism. Collective defence remains subject to decision by the North Atlantic Council (NAC).

--

1. NATO will undertake all its activities related to partners and other international organisations in accordance with the Comprehensive Approach Action Plan and the relevant decisions, including those taken at the Lisbon Summit.
2. Any possible emerging requirements for NATO common funding will be considered in accordance with standard processes.

3. A good example is the Cooperative Airspace Initiative within the framework of the NRC.
4. One example of such cooperation is the Science for Peace and Security (SPS) multi-year NRC project on “Programme for Stand-off Detection of Explosives (STANDEX)”.

## The Alliance Maritime Strategy

### *I. Introduction*

1. The evolving international situation of the 21st century heralds new levels of interdependence between states, international organisations and non-governmental organisations, the increasing complexity of global commerce, and potential threats from both state and non-state actors. Combined with the rapid spread of advanced weapons such as high performance aircraft, submarines, and precision-guided munitions, the Alliance may be challenged in mission areas it has traditionally dominated. This emerging strategic context requires a substantial re-appraisal of the contribution of maritime forces in supporting NATO's objectives over the coming decades. Whether in support of Alliance joint operations, or when leading in a predominately maritime mission, appropriately resourced and enabled maritime forces have critical roles to fulfil, defending and promoting the collective interests of the Alliance across a spectrum of defence and security challenges, as defined in the Strategic Concept. The maritime environment also lends itself well to strengthened engagement in cooperative security.
2. This strategy sets out, in full consistency with the Strategic Concept, the ways that maritime power could help resolve critical challenges facing the Alliance now and in the future, and the roles - enduring and new - that NATO forces may have to carry out in the maritime environment in order to contribute to the Alliance's defence and security and to promote its values. These roles, articulated in Section III, capitalise upon the ability of maritime forces to provide a spectrum of strategic options to the Alliance, and include appropriate contributions to:
  - Deterrence and collective defence;
  - Crisis management;

- Cooperative security: Outreach through partnerships, dialogue and cooperation; and
  - Maritime security.
3. Further transformation of NATO's maritime forces' organisation and capabilities will be necessary to better align NATO's maritime capabilities with the requirements of the missions envisaged in this maritime strategy. This continued transformation will take place in the context of the defence planning process of the Alliance, including its role in balancing resources and requirements. This strategy does not seek an immediate change to Allies' maritime capabilities, but those capabilities will need to evolve in line with this process.

## *II. The maritime security environment*

4. The oceans connect nations globally through an interdependent network of economic, financial, social and political relationships. The statistics are compelling: 70% of the Earth is covered in water; 80% of the world's population lives within 100 miles of the coast; 90% of the world's commerce is seaborne and 75% of that trade passes through a few, vulnerable, canals and international straits. The maritime environment includes trade routes, choke points, ports, and other infrastructure such as pipelines, oil and natural gas platforms and trans-oceanic telecommunications cables.
5. Global trade relies upon secure and low-cost international maritime transportation and distribution networks that are vulnerable to disruption, to the extent that even short interruptions would seriously impact international trade and Allies' economies. Additionally, there are fisheries and other highly valuable resources that lie in, on and beneath the ocean floor. Meanwhile, climatic changes pose new opportunities and challenges, which may, inter alia, allow new and economically attractive sea routes, as well as improved access to resources. The maintenance of the freedom of navigation, sea-based trade routes, critical infrastructure,

energy flows, protection of marine resources and environmental safety are all in Allies' security interests.

6. At the same time, the world's oceans and seas are an increasingly accessible environment for transnational criminal and terrorist activities, including the transport and deployment of weapons of mass destruction and associated materials. Criminal activity in the maritime environment includes the growing range and rate of pirate attacks, which raise concerns about the safety of vessel crews and private citizens. Issues of jurisdiction of merchant vessels using Flags of Convenience but crewed by nationals of many different states further complicate the security tapestry. Globalisation has reduced barriers to other forms of criminal activity, including the illegal trafficking of humans, weapons and narcotics.

### *III. The maritime contribution to Alliance security*

7. Within the strategic environment described above, Allied maritime operations and activities can make vital contributions to Alliance security. Such contributions may include:
  - Deterrence and collective defence;
  - Crisis management;
  - Cooperative security: Outreach through partnerships, dialogue and cooperation; and
  - Maritime security.

The relative weight given to the Alliance's engagement in each of these roles will depend on circumstances and the resources available.

8. These roles require further transformation of NATO's maritime organisation and capabilities to be more efficient and effective. NATO must be able to interact more flexibly across the breadth of the maritime community, including, in accordance with the Comprehensive Approach Action Plan, with international and regional organisations, non-

governmental organisations and law enforcement agencies in the maritime field, as well as with Partner and non-Partner nations on a case-by-case basis, recognising that in today's world, no military organisation can achieve security and defence objectives in isolation. In support of these needs, NATO forces must be as agile, flexible and versatile as possible, well trained and equipped, rapidly deployable and sustainable at strategic distances, and fully interoperable with relevant military and non-military counterparts. All of NATO's activities will be conducted in accordance with international law, including any applicable treaties and customary law and any relevant United Nations Security Council Resolutions.

#### Deterrence and Collective Defence

9. Collective defence and deterrence, including nuclear deterrence, remain the essential political-military cornerstone of NATO's solidarity and mutual commitment. Deterrence relies upon proven capability, demonstrations of readiness, and effective strategic communications. NATO's significant maritime capabilities, which offer speed, lethality, reach, interoperability and endurance, combined with the inherent flexibility of maritime forces are a key component in deterring aggression. The potential role of the Alliance's maritime forces in missile defence may also become an important part of NATO's response to the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery.
10. In accordance with Alliance decisions, the contribution of Alliance maritime forces to deterrence and collective defence will entail:
  - Continuing to contribute to nuclear deterrence in accordance with the Strategic Concept.
  - Providing a wide range of conventional rapid response options including the ability to deliver decisive force rapidly against any opponent, based on superior naval, amphibious and strike forces.
  - Maintaining the ability to deploy, sustain and support effective expeditionary forces through the control of sea lines of

communications, effective mine countermeasure capabilities, the ability to force entry if necessary as well as to project striking power ashore.

- Ensuring that NATO forces have freedom of action through diverse means of reconnaissance and high precision assets.
- Providing a sea-based ballistic missile defence capability, offering strategic flexibility as a contribution to the protection of forward-deployed NATO forces (theatre missile defence) and to the protection of NATO territory and populations against ballistic missile threats in accordance with the decisions taken at the Lisbon Summit.

## Crisis Management

11. Alliance crisis management could include conflict prevention, demonstration of resolve, crisis response operations, peace-enforcement, embargo operations, counter-terrorism, mine clearance, and consequence management, often in austere operating conditions. Although the primary focus of crisis response operations is usually on land, maritime forces can play a critical enabling role in arms embargo and interdiction operations, maritime precision strike in support of ground operations, the flexible deployment of amphibious forces for ground operations, logistic and relief support, surveillance and reconnaissance as well as offering opportunities to minimise footprints ashore by exploiting possibilities to base operations and logistic support at sea. To this end, the maritime contribution to Alliance crisis management will entail:

- Continuing to maintain modern, credible, rapid response joint forces able to operate in environments with degraded communications. The maritime component must be capable of securing sea control and denial, delivering interoperable maritime and amphibious strike, providing a base of operations at sea, and exercising coherent Alliance command and control while operating



with non-NATO navies and organisations in order to deliver decisive effect on, under, above and from the sea.

- Contributing to the provision of urgent humanitarian assistance and disaster relief in accordance with the political framework of NATO's participation in humanitarian operations.
- Leveraging the inherent agility of its maritime forces to provide a flexible and graduated response in crisis or emerging crisis situations, ranging from simple presence, through demonstrations of force, to specific tasks applying tailored forces, including peace-enforcement, embargo and no-fly zone enforcement, counter-terrorism, non-combatant evacuation, and initial entry operations.
- Providing essential logistical support for joint force operations in austere or hostile land environments and the deployment of joint command and logistical bases afloat.

#### Cooperative Security: Outreach through Partnerships, Dialogue and Cooperation

12. Alliance maritime activities make an important contribution to NATO's policy of outreach through partnerships, dialogue, and cooperation. They offer valuable opportunities to prevent conflicts and develop regional security and stability through dialogue, confidence-building, and increased transparency. They can also contribute to building partner capacity, exchanging information, cooperative security, and interoperability, including where activities involving a significant or enduring footprint ashore might be unacceptable. These activities are complementary to what nations conduct themselves and have the added value of demonstrating the Alliance's intention to support partners and of drawing on a wider set of assets and capabilities.
13. The Alliance's maritime operations and activities can strengthen the Alliance's partnerships, dialogue, and cooperation with others through:

- Engaging in diplomatic activities, including through port visits as part of the routine activities of the Standing NATO Maritime Groups.
- Contributing, where appropriate, to partner capacity building by improving the capabilities of our partners to address security threats in the maritime environment and to operate there effectively.
- Conducting joint training, seminars, and exercises with partners.

Such efforts will promote Alliance values.

#### Maritime Security

14. As part of broader efforts to address security threats arising in the maritime environment, NATO maritime forces can contribute to the maintenance of a secure and safe maritime environment given their unique capabilities and routine blue water activities. Existing national and international legislation is sufficient to allow Allies to undertake a range of maritime security operations; however, there may be scope for further enhancing mutual awareness and, where possible, operational harmonisation, among national legal authorities and practices. Maritime security is a suitable area for cooperation with partners.
15. In accordance with international law (including any applicable treaties and customary law), the contribution of Alliance maritime operations and activities to maritime security will entail:
  - Conducting surveillance and patrolling, and sharing information thus gathered, in support of law enforcement in the course of, and as part of, their scheduled NATO activities and deployments within the North Atlantic Treaty Area; and conducting maritime security tasks within the framework of a specific, NAC approved operation either within or beyond the North Atlantic Treaty area. In the latter

case, an authority could also be given to conduct additional maritime security tasks beyond surveillance and patrolling.

- Maintaining the ability of NATO's maritime forces to undertake the full range of maritime interdiction missions, including in support of law enforcement and in preventing the transport and deployment of weapons of mass destruction. In this context, the possible role of maritime forces will be further considered in the overall exploration of ways that the Alliance's political means and military capabilities can contribute to international efforts to fight proliferation. NATO's maritime forces will also be ready and able to support the protection of freedom of navigation.
- Ensuring, in the context of specific, NAC-approved operations, the Alliance's maritime forces are prepared, in accordance with decisions taken at the Lisbon Summit, to contribute to energy security including protection of critical energy infrastructure and sea lines of communication.

#### *IV. The maritime dimension of a comprehensive approach*

16. The nature of naval forces has always required interaction with other maritime actors - almost continually - as a normal part of maritime activity regardless of the role being executed. The maritime experience thus teaches the value and necessity of a Comprehensive Approach, and the Alliance has elaborated an Action Plan to support that approach. To that end:

- The Alliance, in accordance with the Comprehensive Approach Action Plan, will foster enduring relationships with relevant national and international actors in the maritime environment, such as the UN and EU, to contribute to our common goals of preventing conflict, building partner capacity, ensuring the freedom of the seas, upholding international maritime law and promoting Alliance values.

- NATO maritime operations affecting international and regional organisations, non-governmental organisations, law enforcement agencies, as well as partner and non-partner nations, must demonstrate a deep understanding of respective capabilities and cultures to be effective as well as respect the competencies of each organisation or agency. Achieving this demands a high degree of coordination, interaction and training as well as a quest for complementarity whenever appropriate. In this context, greater emphasis should be placed on standardising operating procedures, as well as on promoting joint exercises and training exchanges, as expressed in the Comprehensive Approach Action Plan.

*V. Implementing the maritime strategy through continued alliance transformation*

17. To meet the challenges set out above, further transformation of processes and capabilities is essential. This should continue to build on lessons learned, maximise the use of new technologies and innovations, including for improved maritime situational awareness, encourage greater multinational cooperation and pooling of resources, as well as refine organisational structures, operational concepts, doctrine, training and education.
18. The NATO Defence Planning Process will be key in guiding the ongoing transformation of maritime capabilities to ensure that the Alliance is prepared to confront both traditional and new – often asymmetric – threats. In this context, a premium will continue to be placed on developing capable, flexible, rapidly deployable, interoperable, and sustainable maritime forces. Further elaboration of such implications of this strategy for Alliance transformation will be developed in a separate and subsequent document.

## *VI. Conclusion*

19. The Alliance Maritime Strategy identifies the four roles of NATO's maritime forces: deterrence and collective defence; crisis management; cooperative security – outreach through partnerships, dialogue and cooperation; and maritime security. NATO has already gained extensive experience performing these four roles, which is increasingly relevant in today's complex security environment. The activities that the Alliance will undertake as part of this strategy will be conducted in accordance with international law, including any applicable treaties and customary law, and any relevant United Nations Security Council Resolutions.
20. This strategy will help steer the transformation efforts of the Alliance and will need to be implemented in line with prevailing budgetary circumstances. Further work will therefore be needed, particularly through the NATO Defence Planning Process, to develop the Alliance's capabilities in light of this strategy as well as to identify other areas where transformation is required. This strategy does not seek an immediate change to Allies' maritime capabilities, but those capabilities will need to evolve in line with this process. It aims to ensure that the Alliance continues to have the effective and flexible maritime forces it needs to meet the diverse security challenges of the 21st century.

### **Cyber Defence Pledge**

1. In recognition of the new realities of security threats to NATO, we, the Allied Heads of State and Government, pledge to ensure the Alliance keeps pace with the fast evolving cyber threat landscape and that our nations will be capable of defending themselves in cyberspace as in the air, on land and at sea.
2. We reaffirm our national responsibility, in line with Article 3 of the Washington Treaty, to enhance the cyber defences of national infrastructures and networks, and our commitment to the indivisibility of Allied security and collective defence, in accordance with the Enhanced NATO Policy on Cyber Defence adopted in Wales. We will ensure that strong and resilient cyber defences enable the Alliance to fulfil its core tasks. Our interconnectedness means that we are only as strong as our weakest link. We will work together to better protect our networks and thereby contribute to the success of Allied operations.
3. We welcome the work of Allies and the EU on enhancing cyber security, which contributes to reinforcing resilience in the Euro-Atlantic region, and we support further NATO – EU cyber defence co-operation, as agreed. We reaffirm the applicability of international law in cyberspace and acknowledge the work done in relevant international organisations, including on voluntary norms of responsible state behaviour and confidence-building measures in cyberspace. We recognise the value of NATO's partnerships with partner nations, industry and academia, including through the NATO Industry Cyber Partnership.
4. We emphasise NATO's role in facilitating co-operation on cyber defence including through multinational projects, education, training, and exercises and information exchange, in support of national cyber defence efforts. We will ensure that our Alliance is cyber aware, cyber trained, cyber secure and cyber enabled.

5. We, Allied Heads of State and Government, pledge to strengthen and enhance the cyber defences of national networks and infrastructures, as a matter of priority. Together with the continuous adaptation of NATO's cyber defence capabilities, as part of NATO's long term adaptation, this will reinforce the cyber defence and overall resilience of the Alliance. We will:

I. Develop the fullest range of capabilities to defend our national infrastructures and networks. This includes: addressing cyber defence at the highest strategic level within our defence related organisations, further integrating cyber defence into operations and extending coverage to deployable networks;

II. Allocate adequate resources nationally to strengthen our cyber defence capabilities;

III. Reinforce the interaction amongst our respective national cyber defence stakeholders to deepen co-operation and the exchange of best practices;

IV. Improve our understanding of cyber threats, including the sharing of information and assessments;

V. Enhance skills and awareness, among all defence stakeholders at national level, of fundamental cyber hygiene through to the most sophisticated and robust cyber defences;

VI. Foster cyber education, training and exercising of our forces, and enhance our educational institutions, to build trust and knowledge across the Alliance;

VII. Expedite implementation of agreed cyber defence commitments including for those national systems upon which NATO depends.

6. To track progress on the delivery of our Pledge, we task an annual assessment based on agreed metrics, and we will review progress at our next summit.